

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era big data, informasi mengalir dengan volume dan kecepatan luar biasa, menghadirkan tantangan baru bagi media dalam menjaga akurasi dan kredibilitas pemberitaan (McQuail, 2020). Penyebaran hoaks dan misinformasi melalui saluran digital menuntut keberadaan sistem verifikasi yang tidak hanya ketat, tetapi juga responsif dan adaptif. Dalam konteks ini, peran strategis *gatekeeper* dan *fact-checker* menjadi krusial sebagai pelindung integritas informasi publik. Sejalan dengan itu, Ngwuta (2024) menekankan pentingnya etika jurnalistik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam menangkal distorsi informasi.

Sebagai lembaga penyiaran berita milik negara, Kantor Berita ANTARA memiliki kewajiban institusional untuk memastikan bahwa setiap konten yang disiarkan telah melalui proses verifikasi yang komprehensif dan bebas dari bias. Analisis terhadap mekanisme *gatekeeping* di institusi ini menjadi relevan, terutama dalam konteks tuntutan ganda atas kecepatan dan akurasi dalam lingkungan digital saat ini. Teori *gatekeeping* sebagaimana dikembangkan oleh (Shoemaker, P. J., & Vos, 2009) menggarisbawahi bahwa proses penyaringan berita bukan sekadar seleksi teknis, melainkan juga pembentukan struktur makna yang memengaruhi konstruksi realitas sosial.

Jurnalisme, dalam dimensi etisnya, bukan hanya fungsi prosedural, tetapi juga amanah moral untuk menyampaikan kebenaran. Kovach dan Rosenstiel (2014) menggambarkan praktik jurnalisme profesional sebagai serangkaian tahapan bertingkat—mulai dari peliputan, verifikasi, penyuntingan, hingga distribusi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif teori agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) media memiliki kuasa untuk mengarahkan atensi publik terhadap isu tertentu, dan dalam praktek Kantor Berita ANTARA, keputusan *gatekeeping* terhadap konten yang akan diberi sorotan memiliki dampak signifikan terhadap konstruksi agenda publik.

Fenomena *spiral of silence* (Noelle-Neumann, 1974) juga berperan penting dalam memahami dinamika media digital saat ini. Ketika media dominan seperti Kantor Berita ANTARA menetapkan narasi tertentu sebagai arus utama, opini yang bertentangan cenderung terpinggirkan. Oleh karena itu, sinergi antara *gatekeeper* dan *fact-checker* tidak cukup hanya menjamin kebenaran, tetapi juga inklusivitas ruang diskursus agar tidak terjadi represi terhadap suara minoritas.

Konsep *gatekeeping* yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin (1947), mengalami perluasan makna oleh Shoemaker dan Vos (2009), yang melihat bahwa proses penyaringan informasi dipengaruhi oleh beragam determinan internal dan eksternal, termasuk tekanan politik dan ekonomi. Namun demikian, transformasi digital telah menggeser peran tersebut. (A Hermida, 2012). menyatakan bahwa partisipasi publik dalam produksi informasi telah menggoyahkan monopoli jurnalis atas arus

informasi. Dalam konteks inilah, praktik pemeriksaan fakta (*fact-checking*) tampil sebagai respons kelembagaan atas krisis informasi, mengandalkan validasi berbasis data dari sumber terpercaya (Graves, 2018).

Secara historis, jurnalisme dipahami sebagai praktik sosial yang menggabungkan tanggung jawab etis dan fungsi politik dalam penyampaian informasi publik. Pandangan ini menempatkan jurnalisme bukan semata sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai praktik normatif yang berperan dalam pembentukan opini publik dan penguatan demokrasi (MacDougall, 1987; Kuen, 2008).

Dalam praktik jurnalistik, evaluasi kebenaran tidak berdiri pada satu pendekatan tunggal. Perspektif korespondensi menekankan kesesuaian fakta dengan realitas empiris, koherensi melihat konsistensi logis antar informasi, sementara pendekatan pragmatis menilai kebenaran dari dampak sosial yang dihasilkan. Ketiga perspektif ini menjadi kerangka epistemik penting dalam proses verifikasi berita (Russell, 1912; Blanshard, 1939; James, 1907).

Pendekatan pragmatis menjadi sangat relevan dalam konteks era big data yang penuh gangguan informasi. Kebenaran dalam jurnalisme tidak hanya harus faktual, tetapi juga kontekstual dan berdampak. Dalam ekosistem informasi yang cepat dan masif, tekanan terhadap kecepatan produksi berita kerap mengancam

kualitas verifikasi. Di sinilah peran *gatekeeper* dan *fact-checker* menjadi sentral, tidak hanya sebagai penyaring, tetapi juga sebagai pengawal nilai informasi.

Fenomena di mana informasi tersebar tanpa melalui proses penyaringan editorial yang sah sering direpresentasikan dalam kajian media sebagai bentuk *churnalism*—yaitu produksi ulang konten tanpa verifikasi layak yang mengorbankan kualitas dan akurasi jurnalisme (Jackson, 2008). Dalam ekosistem informasi digital yang penuh dengan *fake news* dan disinformasi, praktik semacam ini berkontribusi pada erosi kepercayaan publik terhadap media arus utama dan memperbesar ruang bagi konten tidak tervalidasi dalam ekosistem informasi digital (Jackson, 2008; UNESCO, 2018).

Prinsip utama jurnalisme adalah komitmen terhadap penyampaian informasi yang bertanggung jawab. Seperti dijelaskan oleh (M. M. Kuen, 2019), kebenaran dalam jurnalisme adalah hasil interaksi kompleks antara pelaku media, narasumber, dan audiens. Jurnalisme menolak keberpihakan dan menjunjung pencarian kebenaran sebagai prinsip etis.

Transformasi media tidak hanya didorong oleh teknologi, tetapi juga oleh kompleksitas kebutuhan informasi masyarakat modern. Model *new journalism* muncul untuk menjawab kebutuhan akan narasi yang lebih mendalam, kontekstual, dan menggugah emosi. Namun, pendekatan ini membawa risiko terhadap objektivitas, karena tekanan dramatik dapat mengaburkan fakta.

Perubahan dari media cetak ke digital memperluas jangkauan informasi. Namun idealisme jurnalistik seperti akurasi dan keberimbangan tetap harus dijaga. Tantangan besar muncul ketika disinformasi merambah ruang digital, menuntut kerja verifikasi yang semakin sistematis.

Sinergi antara *gatekeeping* dan *fact-checking* menjadi krusial dalam menghadapi disinformasi. Ketahanan media dalam menjaga kepercayaan publik terletak pada integritas proses verifikasi, keberpihakan pada kebenaran, dan keterbukaan terhadap kritik. Pada akhirnya, kesadaran etis jurnalis tetap menjadi landasan utama dalam memutuskan kelayakan informasi untuk dipublikasikan.

Big data menambah kompleksitas ekosistem informasi dengan menghasilkan volume data yang masif, berkecepatan tinggi, dan sangat beragam, terutama dari platform media sosial dan aplikasi daring. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan informasi, tetapi juga membawa implikasi epistemologis terhadap cara kebenaran diproduksi, diverifikasi, dan dipahami dalam praktik jurnalistik kontemporer (boyd & Crawford, 2012; Kitchin, 2014; Damayanti, 2017).

Dalam lanskap ini, muncul pendekatan jurnalisme data, yakni praktik jurnalistik yang menekankan pentingnya analisis dan penyajian data secara informatif guna mendukung kejelasan fakta kepada *public* Dwiantoro (2023). Jurnalisme data tidak

hanya memperluas kapasitas media dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, tetapi juga memperkuat fungsi akuntabilitas jurnalisme digital melalui penyajian data yang transparan, dapat diverifikasi, dan berbasis bukti. Praktik ini memungkinkan media menantang narasi dominan sekaligus mendorong literasi data publik dalam ekosistem informasi yang semakin terdigitalisasi (Gray, Chambers, & Bounegru, 2012; Parasie & Dagiral, 2013; Dwiantoro, 2023).

Pendekatan ini melibatkan kerja lintas bidang, termasuk statistika, ilmu komputer, desain komunikasi visual, dan tentu saja, ilmu jurnalistik itu sendiri. Sekalipun sebagian pihak menilai jurnalisme data sebagai perluasan dari metode visualisasi berita konvensional, perannya dalam mendorong akuntabilitas jurnalisme digital tidak dapat diremehkan. Jurnalisme data menjadi cerminan bagaimana media menyesuaikan diri dalam era algoritmis, tanpa melepaskan prinsip dasar verifikasi dan keberpihakan pada publik.

Kemunculan big data telah membuka akses yang sangat luas bagi jurnalis terhadap beragam sumber informasi secara *real-time*. Kemampuan ini memungkinkan pengolahan data menjadi konten yang relevan, aktual, dan memiliki nilai berita yang tinggi. Dalam kerangka kerja jurnalistik, hal tersebut mendukung prinsip-prinsip dasar seperti aktualitas, objektivitas, dan faktualitas dalam penyampaian informasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023), berita didefinisikan sebagai laporan mengenai peristiwa aktual yang memiliki nilai bagi masyarakat. Dalam kajian jurnalistik, definisi tersebut diperkuat oleh

pandangan bahwa berita ideal harus memenuhi unsur 5W+1H, disusun secara faktual, akurat, dan berimbang, serta dipisahkan secara tegas dari opini subjektif jurnalis (McQuail, 2020; Kovach & Rosenstiel, 2014).

Fakta dalam laporan jurnalistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: fakta peristiwa yang berhubungan dengan kejadian nyata seperti bencana atau kecelakaan, dan fakta intelektual, yang mencakup pendapat maupun analisis dari sumber ahli yang memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, opini dari narasumber yang sah dapat diterima sebagai bagian dari struktur berita. Namun, pencampuran opini subjektif jurnalis dalam narasi dapat mengganggu prinsip objektivitas jurnalistik, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *journalistic objectivity theory* yang menekankan netralitas dan independensi dalam penyampaian informasi.

Transformasi digital melahirkan media daring yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti kemampuan menyajikan konten multimedia, kecepatan distribusi, fleksibilitas, kapasitas tidak terbatas, serta konektivitas melalui fitur *hyperlink* (Romli, 2020). Karakteristik ini menjadikan media daring sebagai alat strategis untuk menangkal persebaran hoaks. Dalam situasi krisis informasi, media daring mampu menyediakan ruang untuk klarifikasi secara instan dan menyebarkannya ke audiens dengan jangkauan luas dan waktu yang cepat.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam penyebaran hoaks di Indonesia, dengan dominasi isu politik, kesehatan, dan sosial. Laporan resmi ini mengindikasikan bahwa eskalasi disinformasi tidak hanya dipicu oleh volume konten digital, tetapi juga oleh karakter algoritmik platform media sosial yang mempercepat sirkulasi informasi menyesatkan (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).

Temuan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) menunjukkan bahwa hoaks politik menjadi kategori dominan dalam ekosistem disinformasi digital, terutama menjelang momentum politik nasional. Laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar hoaks politik tersebar melalui *platform visual* seperti TikTok dan Instagram, dengan memanfaatkan manipulasi konteks dan teknologi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake (Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), 2023).

Situasi ini memperlihatkan jurang yang menganga antara kecepatan diseminasi disinformasi dan kapasitas sistem verifikasi konvensional. Kantor Berita ANTARA, sebagai kantor berita nasional, dihadapkan pada dilema ganda: mempertahankan otoritas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi sekaligus mendayagunakan teknologi berbasis NLP (*Natural Language Processing*) dan OSINT (*Open-Source Intelligence*) guna mempercepat respons terhadap ancaman hoaks.

Sejumlah penelitian sebelumnya masih memposisikan *gatekeeping* dan *fact-checking* sebagai dua mekanisme yang terpisah, tanpa membahas secara mendalam integrasi keduanya dalam satu sistem redaksional yang utuh. Pendekatan parsial ini cenderung mengabaikan dinamika kolaborasi antara aktor manusia, teknologi digital, dan struktur kelembagaan media arus utama, khususnya dalam menghadapi disinformasi berskala besar (Ardi et al., 2021; Hadi, 2018; Graves, 2018; Cheruiyot & Ferrer-Conill, 2018).

Survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh 50,26% pengguna internet di Indonesia untuk memperoleh informasi sosial dan lingkungan, 41,6% untuk konten keagamaan, dan 36,94% untuk isu politik (APJII, 2018). Kendati penetrasi internet belum sepenuhnya merata, kehadiran media partisipatoris telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, membentuk opini, serta memengaruhi dinamika sosial-politik nasional (Hapsari, 2020). Transformasi ini sejalan dengan perspektif media ecology, yang memandang medium komunikasi bukan sekadar sarana penyampai pesan, melainkan sebagai elemen yang turut membentuk ekosistem sosial dan budaya komunikasi (Postman & Weingartner, 1970).

Untuk memperjelas rentang pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi di Indonesia, Tabel 1.1 menyajikan proporsi pengguna internet berdasarkan jenis informasi yang diakses. Data ini menunjukkan bahwa informasi

sosial dan lingkungan menempati proporsi tertinggi, yakni 50,26%, diikuti konten keagamaan dan isu politik. Temuan ini mengindikasikan semakin menguatnya peran media sosial sebagai ruang informasi publik yang memengaruhi pembentukan opini dan dinamika sosial-politik masyarakat.

Table 1.1 Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Oleh Pengguna Internet di Indonesia

Jenis Informasi yang Diakses	Persentase Pengguna Internet (%)
Sosial dan Lingkungan	50,26
Keagamaan	41,60
Isu Politik	36,94

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), 2018.

Kondisi ini menegaskan urgensi dari verifikasi informasi. Menurut KBBI (KBBI, 2023) dan *Cambridge Dictionary*, validasi mengacu pada proses untuk mengonfirmasi kebenaran suatu klaim. Dalam kerja jurnalistik, validasi mencakup berbagai tahapan: pembuktian melalui wawancara, pemeriksaan silang, hingga penggunaan teknologi pengecekan fakta otomatis. Aplikasi ini menjadi pelengkap proses verifikasi tradisional yang dilakukan oleh redaktur atau gatekeeper.

Gatekeeper, atau redaktur berita, menjalankan fungsi validasi dengan dua pendekatan utama. Pertama, terhadap produk internal jurnalis, validasi dilakukan

secara manual dengan klarifikasi terhadap narasumber dan pemeriksaan isi sesuai dengan standar logika dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kedua, untuk informasi eksternal atau dari pihak ketiga, validasi juga melibatkan alat bantu teknologi seperti mesin pengecek fakta guna memperkuat akurasi dalam proses penyaringan sebelum publikasi.

Pemeriksaan fakta telah menjadi mekanisme fundamental dalam menjaga akurasi dan kredibilitas pemberitaan di era informasi. Fakta dalam jurnalisme harus dapat dibuktikan secara empiris dan disajikan tanpa dipengaruhi oleh bias personal jurnalis. Di dalam praktik redaksional, redaktur bertugas sebagai benteng terakhir yang menghalangi masuknya informasi keliru—baik itu kesalahan yang tidak disengaja (misinformasi) maupun yang disengaja (disinformasi) (Saptoyo, 2022).

Misinformasi dan disinformasi kini merupakan dua entitas dominan dalam lanskap komunikasi digital. Berdasarkan studi *Pew Research Center* (2021) dan temuan Vosoughi et al. (2018) arus informasi yang mengalir melalui media sosial tidak hanya mempercepat distribusi konten, tetapi juga memperbesar potensi penyebaran hoaks. Fenomena penolakan terhadap vaksin COVID-19, misalnya, memperlihatkan bagaimana kerentanan publik terhadap informasi yang belum tervalidasi dapat berdampak langsung pada keputusan kesehatan masyarakat (Garret, 2022).

Situasi ini menunjukkan bahwa ruang publik digital bersifat terbuka tanpa batas dan sangat rentan terhadap infiltrasi hoaks. Tantangan utama bukan berasal dari aktor dengan literasi rendah, tetapi justru dari individu atau kelompok terlatih yang menyusun narasi secara meyakinkan untuk memengaruhi opini publik. Wardle & Derakhshan (Wardle & Derakhshan, 2017) melalui *kerangka Information Disorder Theory* menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang salah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga ideologis dan ekonomi—di mana produsen hoaks mengeksploitasi kelemahan ekosistem media.

Pelaku hoaks yang tidak profesional biasanya mudah dikenali melalui narasi yang hiperbolik atau ajakan memviralkan berita. Namun, tantangan sesungguhnya muncul dari aktor profesional atau kelompok yang disponsori untuk menyebarkan disinformasi secara sistematis. Mereka merekayasa narasi dengan manipulasi visual, daur ulang peristiwa lama, menciptakan narasumber fiktif, dan menggunakan gaya penulisan jurnalistik yang meyakinkan. Jika redaktur lalai atau tunduk pada tekanan algoritmik dan viralitas, berita palsu dapat menembus filter media arus utama dan merusak kredibilitas institusi pers.

Media nasional juga mencatat peran signifikan generasi milenial dalam ekosistem informasi digital (Republika, 2016) mengungkapkan bahwa generasi milenial memegang peran sentral dalam membentuk ekosistem informasi digital. Mereka berperan sebagai produsen, konsumen, sekaligus distributor informasi. Hal ini sejalan dengan teori *Networked Gatekeeping* (Barzilai-Nahon, 2008), yang

menekankan bahwa fungsi penyaringan informasi tidak lagi eksklusif pada institusi media, tetapi juga berada di tangan individu dan komunitas digital.

Pemahaman mengenai hoaks beragam. MacDougall (dalam Utami, 2018), menyatakan bahwa hoaks adalah kebohongan yang dikemas menyerupai fakta. Sementara itu, *Oxford Dictionary* menekankan aspek penipuan yang dapat membawa konsekuensi serius maupun sekadar menghibur (Juditha, 2018). Dalam konteks kebahasaan Indonesia, hoaks diartikan sebagai informasi palsu yang menyesatkan dan berpotensi mengganggu tatanan sosial jika tidak dikendalikan.

Di tengah maraknya konten menyesatkan, fungsi gatekeeper menjadi semakin penting. Menurut (Leetaru, 2019) *gatekeeper* adalah penjaga narasi kolektif masyarakat—mereka yang menyaring informasi berdasarkan keabsahan dan legitimasi bukti. Jika peran ini dikesampingkan, maka disinformasi akan mengambil alih panggung publik dan mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.

Keberadaan media siber, yaitu media berbasis internet yang beroperasi sesuai regulasi Dewan Pers dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), memiliki peran strategis dalam menghadapi serbuan hoaks (Romli, 2020). Dalam konteks banjir informasi yang tidak terkontrol, media digital yang terpercaya diperlukan sebagai acuan utama untuk penyebaran informasi yang telah melalui proses verifikasi dan pemrosesan profesional. Fungsi ini sangat relevan dalam

membangun masyarakat yang tahan terhadap disinformasi dan memiliki kesadaran kritis terhadap informasi.

Catatan historis memperlihatkan bahwa verifikasi fakta telah menjadi bagian integral dari praktik jurnalistik sejak lebih dari satu abad lalu. Pada tahun 1913, lembaga *New York World* mendirikan "*Bureau of Accuracy and Fair Play*" sebagai respon terhadap keresahan publik atas berita palsu. Kemudian, pada tahun 1923, majalah *Time* menjadi pelopor sistem verifikasi terstruktur dengan mempekerjakan *Nancy Ford* sebagai staf pengecek fakta pertama (Fabry, 2017). Pada masa itu, proses verifikasi bersifat manual dan mengandalkan ketelitian manusia.

Saat ini, pemeriksaan fakta dilakukan oleh tenaga profesional dengan keahlian dalam penalaran kritis dan pencarian bukti. Namun, kompleksitas era digital menjadikan verifikasi tidak cukup hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman. Dengan meningkatnya arus informasi dan laju penyebaran hoaks, pendekatan yang hanya bersifat manual tidak lagi memadai secara efisien. Maka, studi ini menitikberatkan pada evaluasi efektivitas verifikasi informasi dalam menghadapi tantangan zaman digital yang ditandai oleh fenomena *post-truth communication*—dimana emosi dan keyakinan lebih berpengaruh dibanding bukti objektif.

Inisiatif pemeriksaan fakta secara manual memang telah berkembang luas. Namun, ketidaksamaan dalam pemilihan klaim yang diverifikasi dan perbedaan standar antar organisasi memunculkan risiko kebingungan di kalangan masyarakat.

Ketika lembaga pemeriksa memberikan penilaian yang berbeda atas klaim yang sama, kepercayaan publik dapat terkikis. Maka dari itu, sistem verifikasi otomatis berbasis teknologi dikembangkan untuk menyaring klaim dalam skala besar.

Teknologi algoritmik seperti *Natural Language Processing*, pembelajaran mesin, dan *deep learning* digunakan untuk mendeteksi pola dalam kumpulan data raksasa dan menilai kebenaran klaim. Meskipun demikian, sistem ini belum sepenuhnya akurat karena kendala seperti kualitas data pelatihan, kecepatan penyebaran hoaks, dan munculnya format baru seperti *deepfakes* yang sulit diidentifikasi secara otomatis Lee et al. (2023). Oleh karena itu, human-in-the-loop tetap menjadi elemen tidak tergantikan dalam proses verifikasi.

Selain itu, dinamika aktor pemeriksa fakta juga mengalami perubahan. Menurut Direktur IFCN, Alexios Mantzarlis, istilah 'jurnalis' tidak lagi sepenuhnya relevan karena sebagian besar inisiatif verifikasi saat ini dijalankan oleh organisasi nonjurnalistik. Dari 70 inisiatif yang tergabung dalam jaringan IFCN, hanya 11 berasal dari lembaga pers tradisional (Mardjianto, 2018). Ini menandakan adanya pergeseran tanggung jawab dalam praktik *gatekeeping* dari jurnalis ke aktor lintas sektor dalam ekosistem digital yang semakin terdesentralisasi.

Awal kemunculan gerakan pemeriksaan fakta di Indonesia pada penghujung tahun 2016 belum sepenuhnya menyadarkan publik akan kompleksitas persoalan misinformasi dan disinformasi. Pada mulanya, banyak pihak menganggap bahwa

penyebaran hoaks dapat ditanggulangi cukup dengan menyajikan informasi yang benar. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hoaks memiliki akar masalah yang lebih dalam, melibatkan aspek psikologis, politis, dan struktural dalam ekosistem komunikasi digital.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, lahirlah CekFakta.com pada 2 Februari 2018. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam praktik live fact-checking, khususnya dalam konteks pemberitaan politik, dan sekaligus mencerminkan adanya kesadaran kolektif di kalangan pemeriksa fakta di Indonesia terhadap bahaya laten disinformasi. Efektivitas kerja CekFakta.com didorong oleh sinergi empat elemen utama, yakni: media digital, jurnalis pemeriksa fakta, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi teknologi (*programmer*). Hal ini sejalan dengan kerangka *Collaborative Journalism Theory* (Starkman, 2017), yang menekankan pentingnya kerja lintas aktor untuk mempertahankan integritas informasi di era partisipatif. Selain itu juga model kerja empat elemen di atas mencerminkan prinsip *Hybrid Media System* (Chadwick, 2013), dimana aktor-aktor dari sektor media lama dan baru saling berinteraksi dalam memproduksi dan mengatur informasi publik.

Berbagai media daring di Indonesia saat ini telah mengoperasikan kanal verifikasi untuk mengklarifikasi klaim yang beredar luas di ruang digital. Langkah ini merepresentasikan adaptasi media arus utama terhadap tuntutan keakuratan dan

akuntabilitas di tengah dominasi narasi hoaks. Salah satu contoh konkret adalah Kantor Berita ANTARA, yang secara aktif berjejaring dalam aliansi CekFakta.com guna memperkuat sistem pemeriksaan informasi secara kolektif.

Cek Fakta Kantor Berita ANTARA dirancang sebagai kanal yang fokus pada upaya pelurusan informasi palsu dan ujaran kebencian melalui identifikasi dan analisis konten misinformasi di media sosial. Kantor Berita ANTARA memanfaatkan tools pendeteksi klaim dan menjalankan proses verifikasi berdasarkan alur kerja terukur sesuai standar internasional. Prioritas diberikan kepada isu-isu publik yang bersifat mendesak dan berdampak luas, guna menjaga relevansi dan kredibilitas kerja jurnalistiknya.

Model kerja jurnalistik di Kantor Berita ANTARA menggambarkan bagaimana seorang jurnalis mengombinasikan dua jenis fakta dalam proses produksi berita: pertama, fakta empiris, yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap peristiwa di lapangan; kedua, fakta intelektual, yang bersumber dari interpretasi atau komentar narasumber yang memiliki kompetensi substantif dalam isu yang diberitakan. Validitas atas setiap informasi yang akan dipublikasikan menjadi tanggung jawab kolektif antara jurnalis dan redaktur, yang dalam hal ini berfungsi sebagai gatekeeper utama dalam memastikan integritas konten sebelum disiarkan ke publik.

Dalam praktiknya, *fact-checking* secara sistematis hanya dilakukan terhadap berita yang mengandung elemen keraguan atau kecurigaan terhadap kebenarannya. Proses verifikasi ini didukung oleh penggunaan perangkat lunak khusus. Jika informasi dinyatakan benar, berita tersebut dapat disiarkan. Sebaliknya, apabila informasi terbukti sebagai hoaks, maka disajikan dengan label peringatan khusus sebagai bentuk koreksi dan edukasi kepada pembaca.

Perkembangan era big data telah mendisrupsi struktur tradisional pengelolaan informasi. Fokus utama distribusi informasi kini terletak pada kecepatan penyebaran (*dispatch*) alih-alih pada akurasi atau kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam ekosistem media digital, peran gatekeeper manusia mengalami pergeseran signifikan akibat dominasi algoritma platform yang secara otomatis mengkurasi dan mendistribusikan informasi berdasarkan logika keterlibatan pengguna. Fenomena yang dikenal sebagai *algorithmic gatekeeping* ini mengalihkan sebagian kontrol editorial dari institusi media ke sistem platform, sehingga memunculkan tantangan baru terhadap independensi jurnalistik dan integritas informasi publik (Napoli, 2014; Gillespie, 2018; Bucher, 2018).

Menurut laporan Kominfo (2023), sebanyak 65% hoaks politik yang tersebar selama Pemilu 2024 di Indonesia memuat unsur manipulasi visual. Namun demikian, hanya sekitar 30% ruang redaksi media di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi deteksi berbasis kecerdasan buatan. Sementara itu, studi

Irwansyah (2021) mengenai praktik pemeriksaan fakta di Tirto.id dan Kompas.com belum menjangkau persoalan integrasi antara teknologi digital dan fungsi *gatekeeping* yang melekat pada kelembagaan pers.

Dalam konteks ini, ANTARA sebagai kantor berita nasional telah memulai inisiatif pengembangan model verifikasi *hybrid* yang mengombinasikan kecerdasan buatan berbasis NLP (Semar AI), pemantauan berbasis OSINT melalui tim JACX (Jaringan ANTARA Cegah Hoaks), serta keterhubungan dengan platform CekFakta.com melalui sistem API. Meskipun demikian, efektivitas dari model integratif ini belum banyak dieksplorasi secara ilmiah, khususnya dalam aspek resistensi sumber daya manusia terhadap teknologi baru serta potensi bias dalam sistem algoritmik (Brandtzaeg et al., 2021).

Berangkat dari situasi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama yakni : Bagaimana proses kerja dan peran fungsional *gatekeeper* serta *fact-checker* dalam mengelola validitas berita dan menghadapi gelombang disinformasi di lingkungan Kantor Berita ANTARA pada era big data?, Bagaimana ANTARA mengoptimalkan teknologi digital seperti NLP, OSINT, dan API dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja verifikasi fakta di dalam sistem redaksionalnya?, Bagaimana Kantor Berita ANTARA merancang strategi kelembagaan yang adaptif terhadap tekanan algoritmik platform digital dan perubahan ekosistem media, tanpa mengorbankan prinsip jurnalistik?

Seiring laju perkembangan inovasi teknologi verifikasi, proses redaksional di Kantor Berita ANTARA juga mengalami penyesuaian besar dengan mengadopsi teknologi mutakhir seperti *Natural Language Processing* (NLP), *Open-Source Intelligence* (OSINT), serta pemanfaatan *Application Programming Interface* (API). Melalui NLP, redaksi memiliki kemampuan untuk mengenali pola bahasa dalam teks, mengidentifikasi kecenderungan bias, dan mempercepat tahap verifikasi berbasis pemrosesan semantik Ali et al. (2021). OSINT, di sisi lain, memungkinkan analisis terbuka dan penelusuran metadata untuk meningkatkan transparansi serta ketepatan sumber data (Friedrich et al., 2022). Sedangkan integrasi API mendukung sinergi antar aplikasi verifikasi, basis data publik, serta infrastruktur editorial internal, sehingga menghadirkan sistem validasi yang adaptif dan responsif terhadap arus informasi yang dinamis (Choudhary & Jain, 2023).

Perubahan tersebut menegaskan bahwa praktik *gatekeeping* di Kantor Berita ANTARA tidak lagi sepenuhnya manual, tetapi bergeser menuju pola *hybrid verification system* yang memadukan keahlian jurnalis dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan konsep *Computational Journalism* (Diakopoulos, 2019), di mana teknologi harus berfungsi sebagai mitra kerja jurnalis, bukan sekadar alat bantu mekanis, agar prinsip-prinsip verifikasi etis tetap terjaga.

Temuan penelitian sebelumnya pun mendukung urgensi transformasi ini. (Brandtzaeg et al., 2021) menunjukkan bagaimana API publik berperan dalam

mempercepat verifikasi klaim melalui kolaborasi lintas media saat pandemi. van der Linden et al. (van der Linden et al., 2022) menegaskan efektivitas NLP dalam memetakan pola *framing* yang menyesatkan, sedangkan Bhatt et al. (2023) mendemonstrasikan kemampuan OSINT dalam melacak sumber disinformasi multimodal.

Dengan demikian, pola verifikasi di Kantor Berita ANTARA yang mengombinasikan *gatekeeping* tradisional dengan inovasi teknologi cerdas mencerminkan paradigma *eco-systemic verification*, dimana kerja lintas sistem dan lintas aktor dipadukan untuk menjaga kualitas dan akurasi informasi publik di tengah derasnya banjir data digital. Kerangka ini juga dapat dibaca melalui lensa *socio-technical systems theory* (Emery & Trist, 1965), yang menekankan perlunya integrasi harmonis antara teknologi, manusia, dan prosedur organisasi agar adaptasi berjalan optimal.

Sistem kerja jurnalistik di lingkungan Kantor Berita ANTARA memperlihatkan integrasi antara dimensi observasional dan interpretatif dalam membangun narasi berita. Jurnalis tidak hanya bertugas merekam peristiwa nyata di lapangan (fakta empiris), tetapi juga menyajikan pendapat dari narasumber yang memiliki otoritas intelektual atas isu yang dibahas. Proses validasi terhadap informasi ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara jurnalis dan editor redaksi, yang menjalankan fungsi kurasi terakhir sebelum informasi dilepas ke ruang publik.

Aktivitas *fact-checking* umumnya difokuskan pada materi berita yang mengandung potensi misinformasi. Kantor Berita ANTARA menggunakan aplikasi khusus yang dapat mengidentifikasi klaim mencurigakan. Informasi yang lolos verifikasi akan dipublikasikan, sementara konten yang tidak valid akan tetap disiarkan tetapi diberi label hoaks sebagai bentuk pelurusan.

Akibat dari pergeseran ini adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap aplikasi pemeriksa fakta sebagai sumber otoritatif untuk memvalidasi informasi, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan terhadap fungsi *gatekeeper* tradisional dalam media arus utama. Fenomena ini mencerminkan terjadinya desentralisasi epistemik, di mana otoritas kebenaran informasi terfragmentasi dan tidak lagi bersifat hierarkis.

Dalam konteks komunikasi massa, *gatekeeper* berfungsi menyaring informasi berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kepatutan, dan kepentingan umum. Fungsi ini hadir dalam seluruh kanal media, baik cetak, siaran, maupun daring. Menurut (Putri, 2022) dan (Mutiah et al., 2018), *gatekeeper* adalah sosok atau tim yang menentukan apakah suatu informasi layak masuk ke dalam ruang publik atau tidak.

Proses verifikasi mencakup evaluasi terhadap substansi informasi yang masuk ke meja redaksi. Untuk konten internal, redaktur melakukan klarifikasi dengan reporter, memverifikasi sumber, dan menilai struktur logis narasi berita. Sementara untuk konten eksternal, terutama yang memiliki tingkat viralitas tinggi,

proses *fact-checking* dijalankan dengan bantuan teknologi. Dalam kedua skenario, keputusan akhir tetap berada pada redaktur—yang memiliki wewenang untuk menghalangi penyebaran informasi yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu media arus utama yang secara konsisten menjadi rujukan bagi media nasional maupun lokal, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menempati posisi strategis dalam lanskap ekosistem informasi Indonesia. Studi ini berupaya menelaah sejauh mana Kantor Berita ANTARA menerapkan prosedur jurnalistik berbasis perkembangan teknologi komunikasi global dalam sistem kerja redaksionalnya. Hal ini menjadi penting, mengingat Kantor Berita ANTARA telah lebih dahulu memasuki ranah distribusi berita berbasis jaringan sebelum era internet berkembang masif secara global. Melalui kebijakan negara, Kantor Berita ANTARA menggunakan sistem *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) berbasis satelit Palapa untuk menyebarkan berita secara simultan ke seluruh pelosok Indonesia, menjangkau media nasional dan daerah secara bersamaan melalui instalasi parabola mini di kantor-kantor pelanggan. Strategi ini berhasil mengeliminasi sekat antara media pusat dan daerah, karena seluruh pihak menerima informasi dari sumber yang sama dan pada waktu yang sama.

Peluncuran portal berita Antaranews.com pada Januari 1996 menjadi tonggak penting dalam evolusi digitalisasi kantor berita ini. Portal tersebut didirikan untuk menjamin hak publik dalam memperoleh informasi yang akurat, menyeluruh, dan

relevan secara *real-time*. Reputasi ANTARA sebagai salah satu kantor berita terbesar di Asia serta afiliasinya dengan jaringan internasional membuat portal ini menjadi referensi utama, sekaligus magnet informasi bagi masyarakat digital global.

Keberadaan kantor berita seperti ANTARA tidak hanya penting dalam kerangka kedaulatan informasi nasional, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika komunikasi global. Dalam perspektif *global journalism*, kantor berita harus mampu bertindak sebagai aktor informasi yang memahami sekaligus menjembatani kepentingan lokal dan internasional. Oleh karena itu, operasional Kantor Berita ANTARA tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik informasi dan pengaruh algoritmik dari *platform* global.

Validitas informasi menjadi tantangan sentral dalam praktik jurnalistik kontemporer. Di tengah derasnya arus informasi yang dipicu oleh big data dan logika algoritma, kemampuan Kantor Berita ANTARA dalam memelihara kredibilitasnya sangat bergantung pada efektivitas kerja redaksional—terutama pada peran *gatekeeper* dan *fact-checker*. Keduanya memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa informasi yang diterima dan disiarkan telah lolos seleksi etik dan faktual yang ketat.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana Kantor Berita ANTARA mengelola kombinasi fungsi *gatekeeping* dan pemeriksaan fakta dalam menjaga akurasi informasi. Kajian akan difokuskan pada struktur seleksi berita, metodologi

verifikasi, serta tantangan sistemik dan organisasi yang muncul dalam proses tersebut, terutama dalam konteks tekanan dari logika platform, kebutuhan kecepatan distribusi, dan dinamika kepercayaan publik terhadap media.

Urgensi penelitian ini muncul dari pergeseran paradigma distribusi informasi yang semakin terfragmentasi di era digital. Dalam sistem komunikasi yang terdigitalisasi, informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui media profesional kini beredar luas melalui platform media sosial yang tidak mengenal batas institusional. Peran editor atau redaktur sebagai penjaga gerbang informasi tidak lagi eksklusif, karena media baru telah menciptakan sistem kurasi berbasis pengguna dan algoritma.

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan mendasar dalam orientasi jurnanisme. Model *publish-journalism*, yang menitikberatkan pada trafik dan keuntungan ekonomi, secara bertahap menggantikan jurnanisme berbasis etika. Akibatnya, terjadi pelemahan nilai-nilai normatif jurnalistik yang berdampak pada kualitas konten dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya proses teknis, tetapi juga transformasi sosiokultural yang memengaruhi struktur media dan relasi antara jurnalis, audiens, dan teknologi.

Batas yang kabur antara media sosial dan media arus utama menjadi tantangan besar dalam menjaga akurasi informasi. Banyak media profesional

menjadikan konten sosial sebagai referensi tanpa verifikasi memadai, yang membuka peluang bagi disinformasi menyusup ke ruang publik formal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pergeseran fungsi *gatekeeper* dalam konteks media online dan media sosial di era big data serta sejauh mana *fact-checker* mengambil alih atau membantu tugas *gatekeeper*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap mekanisme kerja di ruang redaksi dan wawancara dengan pelaku media. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah fungsi *gatekeeper* benar-benar tergantikan, atau mengalami transformasi dalam bentuk kolaborasi dengan teknologi dan sistem *fact-checking*? Apakah validasi fakta semakin kuat dengan hadirnya *fact-checker*? Dan bagaimana Kantor Berita ANTARA mempertahankan integritasnya di tengah derasny arus disinformasi yang meluas?

Penelitian terdahulu memberikan dasar penting untuk pertanyaan ini. (Irwansyah, 2021) menegaskan bahwa sinergi antara jurnalis, publik, dan teknologi merupakan fondasi penting bagi jurnalisme berbasis pemeriksaan fakta. Beberapa media seperti Tirto.id dan Kompas.com telah membentuk kanal khusus untuk pengecekan fakta, yang terbukti krusial terutama dalam masa krisis seperti pandemi COVID-19 (Prajarto, 2021). Sementara itu, keberadaan Cekfakta.com sebagai platform kolaboratif menunjukkan meningkatnya kesadaran lintas sektor terhadap bahaya hoaks.

Dalam konteks Kantor Berita ANTARA, penelitian (Y. La Ardi et al., 2021) menunjukkan bahwa redaktur memiliki peran vital dalam menyaring konten berdasarkan nilai berita dan orientasi semi-pemerintah. (Aditya, 2017) juga mengungkapkan bahwa proses *gatekeeping* menjadi respons terhadap pemberitaan negatif dari media asing. Di sisi lain, (Hadi, 2018) dan Srikandi et al (Srikandi et al., 2023) menunjukkan bahwa publik kini turut berperan sebagai gatekeeper melalui interaksi digital dan sirkulasi konten.

Dalam konteks tantangan tersebut, kantor berita nasional seperti Kantor Berita ANTARA tidak hanya dituntut untuk menjaga akurasi dan kecepatan, tetapi juga mengembangkan sistem verifikasi yang berbasis teknologi digital. Pemanfaatan teknologi seperti *Natural Language Processing* (NLP) untuk klasifikasi isu, *Open-Source Intelligence* (OSINT) untuk pelacakan sumber informasi digital, serta *Application Programming Interface* (API) untuk verifikasi data secara *real-time*, menjadi bagian integral dari transformasi redaksional di era big data. Ketiga pendekatan ini membuka peluang bagi kolaborasi antara kerja jurnalistik manusia dan sistem komputasi cerdas dalam memproduksi informasi yang kredibel dan tahan terhadap distorsi digital.

Dari berbagai temuan ini, terlihat bahwa praktik *gatekeeping* telah mengalami transformasi dari sistem hirarkis menjadi model kolaboratif yang melibatkan editor, algoritma, dan partisipasi publik. Namun demikian, model ini juga membawa konsekuensi terhadap independensi media dan keberlangsungan integritas etis

dalam jurnalisme. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana Kantor Berita ANTARA mengelola sinergi antara redaktur dan teknologi pemeriksa fakta dalam menjaga kualitas informasi di era media yang makin kompleks.

Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan praktik *gatekeeping* di organisasi media, tetapi juga merespons keterbatasan pendekatan *gatekeeping* klasik dalam menjelaskan integrasi antara penilaian profesional jurnalis dan dukungan teknologi verifikasi dalam ekosistem informasi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana proses kerja dan peran fungsional *gatekeeper* serta *fact-checker* dalam mengelola validitas berita dan menghadapi gelombang disinformasi di lingkungan Kantor Berita ANTARA pada era big data?
2. Bagaimana Kantor Berita ANTARA mengoptimalkan teknologi digital seperti *Natural Language Processing* (NLP), *Open-Source Intelligence* (OSINT), dan *Application Programming Interface* (API) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja verifikasi fakta di dalam sistem redaksionalnya?

3. Bagaimana Kantor Berita ANTARA merancang strategi kelembagaan yang adaptif terhadap tekanan algoritmik platform digital dan perubahan ekosistem media, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti akurasi, independensi dan akuntabilitas publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara sistematis integrasi antara kerja jurnalistik, strategi kelembagaan, dan teknologi digital dalam proses validasi fakta di Kantor Berita ANTARA. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara terstruktur peran *gatekeeper* dan *fact-checker* dalam proses penyaringan informasi dan penanggulangan hoaks di era big data, dengan menekankan pada prinsip akurasi, independensi, dan akuntabilitas publik.
2. Mengidentifikasi tingkat pemanfaatan dan kontribusi teknologi digital, seperti NLP, OSINT, dan API, dalam mempercepat serta memperkuat kualitas proses verifikasi yang dilakukan oleh tim redaksi Kantor Berita ANTARA.
3. Menganalisis rancangan strategi kelembagaan Kantor Berita ANTARA dalam menghadapi tantangan disinformasi dan tekanan algoritmik melalui transformasi sistem kerja, integrasi lintas departemen, serta penerapan teknologi verifikasi digital yang adaptif; sekaligus menyusun

rekomendasi kebijakan strategis untuk penguatan sistem serupa di lembaga media sejenis, khususnya di negara berkembang dengan karakteristik ekosistem digital yang serupa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang jurnalisme digital dan mekanisme validasi berita. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis dan memberikan rujukan empirik mengenai penerapan sistem verifikasi fakta di lingkungan media nasional.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model integrasi antara kerja jurnalistik, kebijakan redaksional, dan teknologi verifikasi digital di lembaga media, terutama dalam menghadapi tantangan disinformasi di era big data.

1.5 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan komunikasi massa dan jurnalisme digital, terutama dalam pengembangan teori *gatekeeping* dan *fact-checking*.

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Menjadi rujukan konseptual dalam memahami transformasi peran *gatekeeper* di tengah perubahan ekosistem media digital yang semakin terdesentralisasi.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model teoritik mengenai kolaborasi manusia dan teknologi (*human–AI collaboration*) dalam proses verifikasi informasi.
3. Menyediakan kerangka empiris bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada adaptasi jurnalisme profesional di era big data, terutama terkait dinamika etika, kecepatan distribusi, dan kredibilitas publik.

1.6 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana Kantor Berita ANTARA mengelola validasi fakta dan menghadapi arus disinformasi melalui sinergi antara peran *gatekeeper* dan *fact-checker*.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi acuan strategis bagi institusi media dalam menyusun kebijakan editorial dan inovasi sistem verifikasi informasi.
2. Mendorong optimalisasi penerapan teknologi berbasis NLP, OSINT, dan API sebagai instrumen pendukung verifikasi yang efisien dan akuntabel.

3. Memberikan dasar bagi pengembangan pedoman praktik profesional yang menjaga keseimbangan antara kecepatan produksi berita dan ketepatan verifikasi fakta.

1.7 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk pemikiran kritis dan empiris mengenai praktik validasi berita serta peran ganda antara *gatekeeper* dan *fact-checker* di era media digital.

Secara lebih khusus, penelitian ini:

1. Memperkaya studi Ilmu Komunikasi dalam bidang jurnalisme dan validasi berita berbasis teknologi digital.
2. Memberikan deskripsi empiris tentang integrasi peran *gatekeeper* dan *fact-checker* dalam menjaga kualitas dan kredibilitas berita di institusi media nasional.
3. Dapat dijadikan referensi ilmiah untuk pengembangan kurikulum, penelitian, dan praktik jurnalisme digital di lingkungan akademik.

1.8 Signifikansi Penelitian

Transformasi ekosistem komunikasi digital telah mengubah paradigma penyebaran informasi secara mendasar. Media sosial yang awalnya dianggap sebagai ruang demokratis kini menimbulkan tantangan baru, di mana batas antara fakta, opini, dan disinformasi menjadi kabur. Dalam konteks tersebut, penelitian ini

memiliki signifikansi penting karena menyoroti evolusi fungsi *gatekeeper* dan munculnya jurnalisme pemeriksa fakta sebagai mekanisme baru validasi informasi publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan landasan empirik dan teoretis yang menjadi titik berangkat bagi penelitian ini.

Studi Dian Tri Hapsari (2020) menunjukkan pentingnya kolaborasi antarmedia dalam tim cek fakta pada pemilihan presiden 2019, yang menandai lahirnya praktik jurnalisme pemeriksa fakta di Indonesia. Penelitian Santoso (2013) menegaskan masih sentralnya fungsi *gatekeeping* konvensional dalam proses produksi berita di media lokal. Sementara itu, Sara Enli (2007) melalui *Gate-keeping in the New Media Age* menguraikan perubahan mendasar fungsi penjaga gerbang di tengah partisipasi publik dan interaktivitas digital. Adapun Irwansyah (2021) menekankan pentingnya sinergi antara jurnalis, publik, dan teknologi dalam praktik jurnalisme pemeriksa fakta di media daring.

Keempat studi tersebut memperlihatkan arah transformasi jurnalisme dari sistem hierarkis menuju model kolaboratif. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji integrasi peran *gatekeeper* dan *fact-checker* dalam satu sistem kelembagaan, terutama pada kantor berita nasional yang menjadi sumber utama informasi publik. Di sinilah letak signifikansi ilmiah dan celah riset (*research gap*) yang diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi utama:

1. **Konseptual:** Mengembangkan pendekatan triadik yang mengintegrasikan peran *gatekeeping* konvensional, praktik *fact-checking* digital, dan penerapan teknologi kecerdasan buatan (NLP dan OSINT) dalam konteks ruang redaksi.
2. **Empirik:** Menyajikan studi kasus Kantor Berita ANTARA sebagai representasi adaptasi media arus utama di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi disinformasi dan tekanan algoritmik.
3. **Praktikal:** Menawarkan model konseptual dan rekomendasi kebijakan strategis bagi negara-negara berkembang untuk membangun ketahanan informasi berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisi ilmiahnya sebagai penyempurna sekaligus penghubung antara kajian-kajian sebelumnya (Hapsari, Santoso, Enli, dan Irwansyah) dengan realitas kontemporer jurnalisme digital di era big data. Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana lembaga media nasional dapat mempertahankan otoritas epistemik dan kredibilitas publik melalui sinergi antara manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan dalam menghadapi disrupsi digital.

1.9 Nilai Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan Model Gatekeeping–Verification Hibrida Berbasis Kinerja Jurnalis yang menjelaskan transformasi mekanisme gatekeeping dalam ekosistem jurnalisme digital sebagai

sistem sosio-teknis yang terintegrasi. Berbeda dari pendekatan gatekeeping klasik yang menempatkan seleksi berita sebagai proses editorial linear maupun perspektif digital yang cenderung menekankan determinisme teknologi, penelitian ini menunjukkan bahwa validasi informasi di era big data terbentuk melalui interaksi dinamis antara editorial gatekeeping, socio-technical gatekeeping, teknologi verifikasi, serta partisipasi publik terbatas dengan jurnalis sebagai aktor epistemik utama. Model ini memperluas teori gatekeeping dengan menegaskan bahwa fact-checking bukan sekadar praktik tambahan, melainkan mekanisme epistemik hibrida yang menghasilkan kredibilitas media, akuntabilitas informasi, dan ketahanan organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual baru dalam kajian jurnalisme digital dengan mengintegrasikan dimensi ideologis, profesional, dan struktural ke dalam kerangka analitis yang dapat diterapkan lintas organisasi media di era disinformasi global.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan dasar penting bagi posisi ilmiah penelitian ini.

Akash Deep Muni (2020) menyoroti absennya peran gatekeeper tradisional di media daring dan dampaknya terhadap etika jurnalisme, namun tidak membahas bagaimana fungsi tersebut dapat direstorasi melalui mekanisme digital.

Penelitian Farid dan Zyad Rusdi (2019) menelaah peran jurnalis online sebagai penjaga gerbang dalam menghadapi tekanan profesional dan etika, tetapi masih berfokus pada dimensi individu, belum pada sistem kelembagaan.

Kasper Welbers dan Michael Opgenhaffen (2018) mengemukakan bahwa model *gatekeeping* konvensional telah usang di era partisipasi publik, tanpa menguraikan kemungkinan integrasi dengan mekanisme *fact-checking*.

Boberg et al. (2018) memperkenalkan konsep moral *gatekeeper* dalam konteks moderasi konten pengguna, namun penelitian tersebut terbatas pada praktik media sosial, bukan *newsroom* profesional.

Sementara (Graves & Cherubini, 2016) menelusuri kebangkitan situs *fact-checking* di Eropa sebagai respons terhadap krisis kepercayaan publik, tetapi tidak mengkaji hubungan struktural antara organisasi pemeriksa fakta dan lembaga berita nasional.

Kelima studi tersebut memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan fungsi *gatekeeping* dan *fact-checking*, serta belum mengintegrasikan peran teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai komponen epistemik dalam proses verifikasi berita.

Kekosongan inilah yang menjadi landasan kebaruan (*research gap*) bagi penelitian ini. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan tiga dimensi kebaruan utama:

Dimensi Konseptual:

Menggabungkan teori *gatekeeping* dan *fact-checking* dalam kerangka kolaboratif-verifikatif yang menempatkan manusia (jurnalis dan redaktur) serta teknologi (NLP, OSINT, dan API) sebagai elemen simbiotik dalam menjaga kebenaran informasi. Pendekatan ini memperluas batas teori *gatekeeping* klasik menuju konsep *hybrid verification system* di era big data.

Dimensi Kontekstual:

Menghadirkan Kantor Berita ANTARA sebagai studi kasus representatif dari media nasional yang berperan strategis dalam distribusi informasi publik di Indonesia. Fokus ini belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya, terutama yang menelaah integrasi *gatekeeping* dan *fact-checking* pada lembaga berita negara di kawasan Asia Tenggara.

Dimensi Metodologis:

Mengintegrasikan pendekatan sosio-teknikal dan computational journalism dalam menganalisis sistem verifikasi berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan NLP, OSINT, dan API, penelitian ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi manusia

dan mesin dapat memperkuat validasi informasi sekaligus menjaga prinsip etika jurnalistik.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis teoritik dan empiris yang menghubungkan model *gatekeeping* klasik, praktik *fact-checking* digital, dan sistem verifikasi berbasis AI ke dalam satu kerangka kerja yang utuh.

Penelitian ini tidak hanya memperluas horizon keilmuan jurnalisme digital dan komunikasi massa, tetapi juga memberikan model konseptual baru bagi media nasional di era disinformasi global.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Latar Belakang Teoritis

2.1.1 Transformasi Ekosistem Media Digital

Ekosistem media kontemporer mengalami perubahan struktural akibat konvergensi teknologi digital yang menggeser pola komunikasi dari model linear menuju jaringan yang saling terhubung secara intensif. Produksi dan distribusi informasi kini berlangsung dalam ruang *networked publics*, di mana audiens, jurnalis, dan sistem algoritmik berinteraksi secara simultan dalam membentuk arus informasi (boyd, 2011). Pergeseran ini berdampak langsung pada praktik jurnalistik, khususnya dalam aspek produksi, distribusi, dan verifikasi berita.

Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap berkurangnya dominasi institusi media arus utama sebagai satu-satunya penjaga gerbang informasi. Proses seleksi berita tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh editor atau redaksi, melainkan melibatkan beragam aktor, termasuk pengguna individu dan sistem otomatis berbasis algoritma. Kondisi ini menandai transformasi signifikan dari model *gatekeeping* klasik yang menempatkan editor sebagai penyaring tunggal informasi (White, 1950; Shoemaker & Vos, 2009).

Selain itu, kompetisi merebut perhatian publik di ruang digital melahirkan apa yang disebut sebagai ekonomi perhatian, di mana metrik keterlibatan seperti klik,

komentar, dan sebaran sosial menjadi indikator utama nilai berita. Logika ini mendorong pergeseran orientasi produksi berita dari nilai normatif jurnalistik menuju performativitas berbasis data dan audiens terkuantifikasi (Petre, 2015; Tandoc Jr. & Thomas, 2015; Siles et al., 2020).

Lembaga media *legacy* seperti Kantor Berita ANTARA menghadapi tekanan struktural untuk menyesuaikan diri dengan realitas digital yang cepat berubah. Dalam lanskap (*landscape*) ini, otoritas epistemik tidak lagi bersifat stabil atau melekat pada institusi, melainkan dikonstruksi ulang secara terus-menerus melalui interaksi antara data, algoritma, dan kecepatan distribusi informasi (Carlson, 2017). Oleh karena itu, adopsi teknologi analitik berbasis big data menjadi syarat esensial guna menjaga validitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik.

Tabel 2.1 Dampak Big Data Pada Jurnalistik

Dimensi	Tantangan	Respons Strategis
<i>Volume</i>	<i>Overload</i> informasi	Filter algoritmik (Diakopoulos, 2019)
<i>Velocity</i>	Tekanan waktu verifikasi	Verifikasi <i>real-time</i> (Graves, 2018)
<i>Variety</i>	Fragmentasi format konten	Pendekatan multimedia (Deuze, 2008)

Veracity	Krisis kredibilitas	<i>Fact-Checking</i> kolaboratif (Tandoc & Thomas, 2021)
-----------------	---------------------	--

Tiga dampak utama tersebut menunjukkan bahwa kerja jurnalistik kini beroperasi dalam lingkungan (lingkup) yang ditentukan oleh sirkulasi informasi cepat, sistem distribusi non-linear, dan tekanan metrik digital. Dalam konteks ini, Kantor Berita ANTARA menjadi contoh empirik penting bagaimana institusi media harus mentransformasi model kerja mereka untuk tetap relevan di tengah ekosistem big data dan disinformasi yang semakin kompleks.

Infografik 2.1 Struktur Distribusi Informasi

Era Big Data [Peristiwa] → [Platform] → [Algoritma] → [Redaksi] → [Publik] →
[Feedback Loop]

Urgensi Peran Kantor Berita Nasional dalam Mitigasi Disinformasi

Sebagai infrastruktur informasi publik, kantor berita nasional memikul fungsi ganda: sebagai institutional *gatekeeper* dan *steward of democratic discourse* (Nielsen, 2017). Dalam konteks Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap disinformasi (Jurriëns & Tapsell, 2017), Kantor Berita ANTARA beroperasi sebagai trust anchor di tengah krisis epistemik. Institusi ini menjalankan fungsi *corrective fact-checking* dan *preventive gatekeeping* melalui kurasi sumber dan framing berita

berbasis bukti. Dalam paradigma information integrity, kantor berita nasional adalah benteng melawan erosi kepercayaan publik yang dipolitisasi (Lazer et al., 2018).

2.2 Paradigma Jurnalistik Digital

Paradigma Jurnalistik di Era Digital: Prinsip, Tantangan, dan Reformasi

Transformasi digital telah mendefinisikan ulang peran jurnanisme dalam masyarakat kontemporer. Jurnanisme bukan sekadar aktivitas pelaporan fakta, tetapi arena kontestasi epistemik yang diwarnai oleh dinamika teknologi, tekanan algoritmik, dan ekspektasi publik yang terus berubah. Praktik jurnalistik saat ini menghadapi trilema antara kecepatan, kedalaman verifikasi, dan kepekaan konteks sosial.

Transformasi Nilai Berita dalam Ekosistem Digital

Nilai-nilai fundamental dalam praktik jurnanisme—seperti ketepatan informasi, independensi, prinsip verifikasi, dan komitmen terhadap kepentingan publik—sebagaimana dirumuskan oleh Kovach dan Rosenstiel (2001), tetap menjadi kerangka acuan normatif. Namun demikian, dalam lanskap digital kontemporer, prinsip-prinsip tersebut mengalami proses reinterpretasi yang signifikan. Parameter seperti jumlah klik, tingkat keterlibatan audiens, serta potensi viralitas konten kini menjadi indikator utama dalam proses penyaringan berita. Dengan demikian, mekanisme seleksi redaksional tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai

ideal normatif, melainkan lebih banyak diarahkan oleh logika performatif platform digital.

Transformasi struktural dalam ekosistem jurnalisme digital memperlihatkan tiga arah perubahan:

1. **Partisipasi Audiens:** Audiens turut menentukan kelayakan berita (Bruns, 2005).
2. **Adaptasi Verifikasi:** Verifikasi menggunakan reverse image search, metadata, dan OSINT.
3. **Segmentasi Distribusi:** Konten didistribusikan secara personal dan algoritmik (Pariser, 2011).

Prinsip dan Etika Jurnalisme Profesional

Prinsip dasar seperti akurasi, independensi, verifikasi, dan loyalitas pada publik (Bill Kovach & Rosenstiel, 2001) tetap menjadi pilar normatif jurnalisme. Namun, tantangan baru muncul dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut di tengah tekanan produksi cepat, konten viral, dan algoritma yang bias. Jurnalisme profesional di era ini menuntut disiplin verifikasi yang lebih kompleks—mengintegrasikan teknologi (NLP, AI), etika digital, dan partisipasi publik.

Jurnalistik Online: Adaptasi dan Norma Baru

Jurnalisme online membawa ciri khas seperti interaktivitas, hipertekstualitas, dan multimedialitas (Deuze, 2008), yang memperluas peran audiens dari konsumen

menjadi *co-producer*. Prinsip-prinsip tradisional kini harus bernegosiasi dengan pedoman digital baru seperti BASIC (*Brevity, Adaptability, Scannability, Interactivity, Conversation*) Bradshaw, P., & Rohumaa, L. (2013).

Fakta vs Opini: Ketegangan Epistemik

Dalam era pasca-kebenaran, pemisahan antara fakta dan opini menjadi kian genting. Fakta tidak hanya menjadi dasar berita, tetapi juga benteng terhadap disinformasi. Dalam praktik jurnalistik, fakta dan opini harus diposisikan secara epistemologis berbeda—fakta sebagai hasil verifikasi empiris, opini sebagai interpretasi naratif (Shoemaker & Reese, 2014).

Tabel 2.2 Fakta dan Opini

Aspek	Fakta	Opini
Sumber	Data empiris, dokumen, saksi	Nilai, perspektif individu
Verifikasi	Harus bisa diuji	Tidak selalu bisa dibuktikan
Tujuan	Mencerminkan realitas objektif	Menggambarkan interpretasi subjektif

Tantangan Etis dan Disinformasi

Meningkatnya hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber memperbesar risiko bias, manipulasi, dan erosi kepercayaan publik. Praktik jurnalisme etis kini tidak hanya menuntut kejujuran dan akurasi, tetapi juga kecakapan dalam literasi

digital, empati sosial, serta kolaborasi dalam ekosistem verifikasi. Pendekatan kolaboratif dan pendekatan berbasis komunitas menjadi respons strategis terhadap krisis disinformasi (Wardle & Derakhshan, 2017).

Praktik jurnalisme profesional disusun di atas landasan normatif yang menekankan pada etika pelayanan publik, integritas pribadi, dan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Kovach dan Rosenstiel (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2001) merumuskan sembilan prinsip utama yang menjadi kompas moral bagi jurnalis, mencakup komitmen terhadap pencarian kebenaran, tanggung jawab terhadap warga, penerapan metode verifikasi, kebebasan dari pengaruh narasumber, fungsi *watchdog* terhadap kekuasaan, penyediaan forum publik, relevansi konten, proporsionalitas, serta integritas moral sebagai penopang kredibilitas.

Walaupun prinsip-prinsip ini tetap dianggap sebagai kerangka acuan yang ideal, realitas media digital telah mengubah cara nilai berita didefinisikan dan dijalankan. Pada masa media analog, kriteria seperti kedekatan geografis, skala dampak, dan urgensi waktu menjadi penentu utama seleksi berita. Akan tetapi, di era digital yang ditandai oleh hiper-konektivitas dan algoritmisasi konten, parameter kelayakan kini bergeser pada indikator keterlibatan seperti jumlah klik, tingkat penyebaran (*share*), impresi, dan sistem rekomendasi berbasis preferensi pengguna (Deuze, 2005); (Bradshaw & Rohumaa, 2013).

Dinamika ini menciptakan semacam ketegangan antara nilai-nilai normatif jurnalisme dan tuntutan pasar informasi digital. Sebagaimana diilustrasikan dalam perbandingan antara ekosistem analog dan digital, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi nilai dan proses editorial yang mendasarinya. Reorientasi ini bukan sekadar adaptasi teknologis, melainkan pergeseran struktural yang mencerminkan dominasi logika platform dan *kapitalisme digital* (Couldry & Mejias, 2019).

Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip jurnalisme mengalami reinterpretasi akibat penetrasi logika algoritma ke dalam proses editorial. Nilai-nilai yang dahulu menjadi acuan utama dalam penilaian kelayakan berita, kini ditransformasikan oleh sistem distribusi yang dikendalikan oleh performa teknometrik. Atensi publik pun lebih banyak dibentuk oleh dinamika konsumsi digital yang bersifat reaktif, bukan oleh proses kuratorial berbasis kepentingan publik. Sejalan dengan teori ekologi media yang dikemukakan oleh Postman (Postman, 1992), medium bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan turut membentuk struktur epistemologi masyarakat—dalam hal ini, menggiring jurnalisme ke arah yang lebih reaktif, instan, dan terdorong oleh impresi, ketimbang refleksi kritis.

Pergeseran nilai ini dapat divisualisasikan dalam bagan berikut:

Bagan 2. 1 Evolusi Nilai Berita di Era Digital

Era Analog	→	Era Digital	Implikasi
Kedekatan (<i>proximity</i>)	→	<i>Engagement</i>	Konten diprioritaskan berdasarkan interaksi audiens (<i>likes, shares</i>).
Dampak (<i>impact</i>)	→	<i>Shareability</i>	Viralitas menjadi indikator utama nilai berita.
Ketepatan waktu (<i>timeliness</i>)	→	<i>Personalisasi</i>	Algoritma menyajikan konten sesuai preferensi individu.
Obyektivitas	→	<i>Transparansi</i>	Keterbukaan sumber dan proses lebih dihargai daripada netralitas mutlak.

Transformasi struktural dalam ekosistem jurnalisme digital memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara nilai berita dibentuk, disaring, dan disebarluaskan. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga arah perubahan signifikan yang mencerminkan adaptasi jurnalisme terhadap logika digital.

Pertama, telah terjadi pergeseran dari sistem penentuan nilai berita yang bersifat hierarkis menuju model yang lebih partisipatif. Jika sebelumnya keputusan

mengenai kelayakan berita sepenuhnya berada di tangan redaksi, kini audiens turut memainkan peran aktif melalui kontribusi konten, komentar, hingga praktik *user-generated content* (Mark Deuze, 2008). Proses ini mencerminkan implikasi dari *networked journalism*, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur (Bruns, 2005).

Kedua, prinsip-prinsip jurnalistik konvensional seperti verifikasi tidak lagi dijalankan dalam kerangka linier sebagaimana praktik sebelumnya. Dalam lingkup digital, prinsip tersebut mengalami adaptasi melalui pemanfaatan perangkat dan teknik berbasis teknologi, misalnya *reverse image search*, metadata analysis, dan pendekatan *open-source intelligence* (OSINT). Transformasi ini menunjukkan bahwa validasi informasi kini bersifat dinamis dan terintegrasi dalam arsitektur digital yang cair.

Ketiga, orientasi distribusi informasi yang dulu bersifat massal dan homogen kini telah bergeser menuju pendekatan yang bersifat personal dan tersegmentasi. Mekanisme personalisasi konten—yang digerakkan oleh data perilaku pengguna dan sistem rekomendasi algoritmik—telah menggantikan model penyiaran tradisional yang mengandalkan format “satu-untuk-semua” (Bradshaw & Rohumaa, 2013). Konsekuensinya, proses kurasi informasi menjadi semakin terspesialisasi, tetapi juga berisiko menciptakan ruang gema (*echo chambers*) dan polarisasi opini (Pariser, 2011).

Karakteristik Jurnalisme Digital

Praktik jurnalisme di era digital tidak sekadar mentransposisikan model konvensional ke dalam ranah daring, melainkan menciptakan logika baru dalam produksi, distribusi, dan interpretasi informasi. Setidaknya terdapat tiga karakteristik mendasar yang membedakan jurnalisme digital dari bentuk tradisional, yaitu: interaktivitas, hipertekstualitas, dan multimedialitas. Masing-masing dimensi ini membawa implikasi terhadap struktur organisasi redaksional, sistem kerja teknologi, dan norma etika jurnalistik kontemporer.

1. Interaktivitas

Dalam konteks jurnalisme digital, interaktivitas menjadi ciri utama yang mengubah relasi antara jurnalis dan audiens. Audiens tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, tetapi turut berperan sebagai partisipan aktif dalam produksi dan sirkulasi informasi melalui komentar, pelaporan langsung, maupun praktik jurnalisme warga. Pola ini merefleksikan pergeseran menuju budaya partisipatif yang menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari institusi media (Jenkins, 2006).

2. Hipertekstualitas

Karakteristik lain dari jurnalisme digital adalah hipertekstualitas, yakni kemampuan teks jurnalistik untuk terhubung dengan berbagai sumber internal maupun eksternal melalui pranala digital. Struktur narasi yang nonlinier ini

memperluas konteks dan memungkinkan pembaca menelusuri informasi secara lebih mendalam, meskipun sekaligus menantang redaksi untuk menjaga koherensi dan konsistensi pesan (Deuze, 2008).

3. Multimedialitas

Multimedialitas juga menjadi elemen penting dalam praktik jurnalistik daring. Integrasi teks, audio, video, dan infografik memungkinkan penyajian berita yang lebih adaptif terhadap preferensi audiens. Namun, perkembangan teknologi manipulasi visual seperti deepfake menghadirkan tantangan baru terkait validitas representasi digital, sehingga menuntut penguatan strategi verifikasi berbasis teknologi (Bradshaw & Rohumaa, 2013; Chesney & Citron, 2019).

Untuk memperjelas keterkaitan antara karakteristik, dampak, dan solusi teknologi, berikut disajikan tabel ringkasan:

Tabel 2.3 Analisis Karakteristik Jurnalisme Online

Karakteristik	Keunggulan	Tantangan	Teknologi Pendukung
Interaktivitas	Mendorong partisipasi public (Jenkins, 2006)	Risiko misinformasi dalam kolom komentar	CMS dengan fitur moderasi (e.g., Disqus)live chat tools

Hipertekstualitas	Memperkaya konteks berita (Deuze, 2008)	Pembaca mungkin tersesat dalam tautan	Alat <i>link analytics</i> (e.g., Google Analytics)
Multimedialitas	Memenuhi preferensi audiens beragam (Bradshaw & Rohumaa, 2013)	Biaya produksi tinggi	<i>Software editing</i> (e.g., Adobe Premiere)

Melalui sinergi antara interaktivitas, hipertekstualitas, dan multimedialitas, jurnalisme digital melahirkan pola penyajian informasi yang lebih terbuka, responsif, dan visual. Akan tetapi, kompleksitas teknologi yang menyertainya turut menuntut redaksi untuk merumuskan ulang standar operasional, terutama dalam aspek verifikasi dan kebijakan editorial. Upaya ini menjadi krusial dalam menjaga kredibilitas informasi di tengah arus distribusi digital yang kian cepat dan masif.

Analisis Kritis Kovach & Rosentiel (Bill Kovach & Rosenstiel, 2001), Model ini terlalu menekankan prinsip universal dan kurang fleksibel dalam menghadapi distribusi *non-linear*, algoritmik, dan *user-generated content*. Dalam lanskap digital, idealisme etis jurnalisme konvensional sering kali dikompromikan oleh logika performa platform.

2.3 Teori *Gatekeeping*: Evolusi Dan Model

2.3.1 Model Klasik hingga Kontemporer

Perjalanan historis teori *gatekeeping* mencerminkan upaya adaptif terhadap dinamika perubahan lanskap media, yang beralih dari sistem linier menuju jaringan informasi yang bersifat terdesentralisasi. Jika pendekatan awal menitikberatkan pada subjektivitas individu, maka pendekatan kontemporer mengadopsi perspektif yang lebih kompleks, mencakup aktor manusia maupun non-manusia.

1. Model *Gatekeeping* Klasik – White (1950)

Teori *gatekeeping* menjelaskan bagaimana proses seleksi dan penyaringan informasi dilakukan sebelum dipublikasikan kepada publik. Model awal *gatekeeping* menempatkan editor sebagai aktor kunci yang menentukan informasi apa yang layak diberitakan. Dalam perkembangan selanjutnya, proses ini dipahami sebagai mekanisme yang lebih kompleks dan melibatkan interaksi antara individu, organisasi, teknologi, dan struktur sosial yang lebih luas (Shoemaker & Vos, 2009; White, 1950).

Dalam ekosistem media digital, *gatekeeping* tidak lagi bersifat linear dan hierarkis, melainkan berlangsung dalam jaringan yang saling terhubung. Sistem algoritmik, platform digital, dan partisipasi audiens turut berperan dalam membentuk alur distribusi informasi. Konsep *networked gatekeeping* digunakan untuk

menjelaskan kondisi ini, di mana kontrol informasi tersebar di antara berbagai aktor dan teknologi (Barzilai-Nahon, 2008).

2. Model Hierarki Multi-Level – Shoemaker & Vos (2009)

Shoemaker dan Vos memperluas kerangka pemikiran White dengan menawarkan pendekatan struktural. Dalam model hierarkis mereka, proses *gatekeeping* dipengaruhi oleh berbagai lapisan—mulai dari level individu, praktik redaksional, struktur organisasi, hingga kekuatan eksternal seperti ekonomi politik dan ideologi dominan. Pendekatan ini memandang *gatekeeping* sebagai proses sosial yang kompleks dan berjenjang.

Model ini tetap relevan di era digital, khususnya dalam menjelaskan bagaimana keputusan redaksional dibentuk oleh kombinasi tekanan internal dan eksternal, termasuk intervensi algoritmik dan logika *engagement* yang didorong oleh media sosial.

3. Model Jaringan – Barzilai-Nahon (2008)

Barzilai-Nahon memperkenalkan teori *gatekeeping* berbasis jejaring (*network gatekeeping theory*), yang menekankan bahwa dalam ekosistem digital, peran sebagai penjaga gerbang informasi bersifat terbuka dan saling tumpang tindih. Siapa pun, termasuk pengguna biasa, bisa menjadi “gatekeeper” sekaligus “gated” dalam sistem yang cair.

Ia juga memperkenalkan konsep seperti *gatekeeping mechanisms* dan *power relations*, yang menunjukkan bahwa kontrol informasi di era jaringan tidak lagi bersifat sepihak. Model ini sangat relevan untuk memahami bagaimana algoritma, komunitas daring, dan individu saling berinteraksi dalam memproduksi dan menyaring informasi.

2.3.1.1 Transformasi *Gatekeeping* dalam Ekosistem Digital

Gatekeeping Klasik = editorial Gatekeeping

Berdasarkan uraian sebelumnya, *gatekeeping* dalam perspektif klasik dipahami sebagai mekanisme editorial yang dilakukan oleh jurnalis dalam menentukan kelayakan suatu informasi sebelum dipublikasikan kepada publik. Proses seleksi ini tidak hanya didasarkan pada nilai berita, tetapi juga pada pertimbangan etis, tanggung jawab sosial, serta standar profesional jurnalistik. Dalam kerangka ini, jurnalis berperan sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi penyaringan informasi melalui keputusan redaksional yang bersifat manual dan berbasis penilaian profesional.

Gatekeeping Digital = Socio-Technical Gatekeeping

Namun demikian, dalam konteks ekosistem media digital yang ditandai oleh percepatan arus informasi dan kompleksitas disinformasi, mekanisme seleksi informasi tidak lagi sepenuhnya dilakukan melalui pertimbangan editorial manual. Perkembangan teknologi verifikasi berbasis data, seperti pemanfaatan OSINT, *Natural Language Processing* (NLP), dan *Application Programming Interface* (API), memungkinkan proses penyaringan informasi dilakukan melalui integrasi antara penilaian profesional jurnalis

dan dukungan sistem teknologi. Dalam konteks jurnalisme digital, *fact-checking* dapat dipahami sebagai bentuk *technological gatekeeping* yang berfungsi memperkuat mekanisme seleksi informasi melalui dukungan sistem verifikasi berbasis data.

Dalam konteks jurnalisme digital, *fact-checking* dapat dipahami sebagai bentuk *technological gatekeeping* yang berfungsi memperkuat mekanisme seleksi informasi melalui dukungan sistem verifikasi berbasis data.

Dengan demikian, *gatekeeping* dalam organisasi media kontemporer berkembang menjadi proses sosio-teknis yang mengintegrasikan keputusan editorial jurnalis dengan dukungan teknologi verifikasi. Perkembangan ini menjadi dasar konseptual dalam memahami praktik *gatekeeping* sebagai mekanisme hibrida yang tidak hanya bersifat editorial, tetapi juga melibatkan sistem teknologi dan partisipasi publik dalam proses validasi informasi.

Relevansi di Era Digital

Ketiga pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan teoritik dari kontrol informasi yang bersifat sentralistik menuju distribusi kuasa dalam ekosistem digital. Dalam praktik redaksional ANTARA, misalnya, penerapan sistem verifikasi berbasis teknologi seperti NLP dan OSINT menunjukkan urgensi model hibrida yang memadukan *gatekeeping* konvensional dengan logika jejaring digital.

Tabel 2.4 Perbandingan Model *Gatekeeping*

Model	Unit Analisis	Keterbatasan	Relevansi Era Digital	Contoh Implementasi
White (1950)	Subjektivitas editor	Mengabaikan tekanan eksternal	Terbatas	Seleksi berita cetak tradisional
Shoemaker-Vos (2009)	Pengaruh multi-level	Kompleksitas operasional	Tinggi	Kebijakan redaksi multimedia
Networked (Barzilai-Nahon, 2008)	Distribusi kuasa	Minim akuntabilitas algoritma	Sangat tinggi	Moderasi konten media sosial

Evolusi Paradigmatis:

Dari Sentralisasi Menuju Koordinasi Multipolar.

Model *gatekeeping* yang dikemukakan White (White, 1950) menempatkan editor sebagai pengendali tunggal dalam menentukan apa yang layak diberitakan. Meskipun berguna untuk menjelaskan praktik redaksional masa lalu, pendekatan ini

dianggap tidak memadai dalam mengakomodasi pengaruh eksternal seperti intervensi politik, tekanan ekonomi, dan keterlibatan public.

Sebaliknya, pendekatan Barzilai-Nahon (Barzilai-Nahon, 2008) memperluas konsep ini dengan melibatkan entitas algoritmik, komunitas daring, serta kecerdasan buatan sebagai bagian integral dari arsitektur penyaringan informasi.

Dari Rantai Linier ke Struktur Interaktif.

Shoemaker dan Vos (Shoemaker, P. J., & Vos, 2009) mengembangkan kerangka berpikir yang lebih fleksibel melalui konsep "hierarki pengaruh", mencakup lima tingkat: individu, rutinitas kerja, organisasi, tekanan eksternal, dan ideologi. Model ini memungkinkan pemetaan pengaruh secara sistemik, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana platform digital dan algoritma berperan dalam proses distribusi informasi masa kini.

Kontribusi Empiris dalam Konteks ANTARA.

Dalam studi kasus Kantor Berita ANTARA, ketiga pendekatan tersebut menunjukkan fungsi yang saling melengkapi. Model White relevan untuk memetakan fase awal sistem redaksional konvensional. Pendekatan Shoemaker-Vos memberikan kerangka untuk memahami interaksi antara struktur internal dan eksternal dalam seleksi konten. Sementara itu, perspektif Barzilai-Nahon (Barzilai-Nahon, 2008) menjelaskan dinamika distribusi konten digital yang dipengaruhi oleh interaksi antara pengguna, platform, dan perangkat otomatis.

Dengan demikian, perkembangan teori *gatekeeping* tidak hanya menunjukkan evolusi konsep, tetapi juga menandai pergeseran epistemologis dalam studi komunikasi. Proses penyaringan informasi kini bukan lagi monopoli institusi media, melainkan merupakan hasil negosiasi antara berbagai aktor dalam ruang informasi digital yang terbuka dan terus berubah.

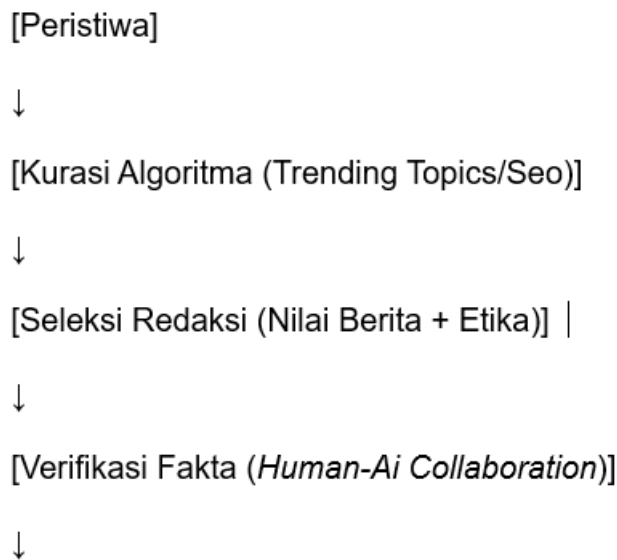
Teori **White (1950)** Model ini terlalu berfokus pada agensi individu (*editor*), sehingga tidak mencerminkan realitas informasi digital yang terdesentralisasi. Dalam ekosistem digital, proses penyaringan lebih bersifat kolektif dan terdigitalisasi melalui kolaborasi manusia dan sistem.

Dengan demikian, teori *gatekeeping* kini harus diposisikan dalam kerangka sistemik yang tidak hanya melihat siapa yang menyaring informasi, tetapi juga bagaimana, dengan alat apa, dan dalam konteks apa penyaringan itu berlangsung. Evolusi model *gatekeeping* mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol editorial tunggal menuju negosiasi multipolar yang ditentukan oleh algoritma, komunitas daring, dan strategi organisasi media dalam menghadapi tekanan big data.

2.3.2 Implementasi Di Ruang Redaksi

Penerapan konsep *gatekeeping* dalam praktik redaksional masa kini menunjukkan kecenderungan untuk menggabungkan pendekatan klasik dengan inovasi digital. Alih-alih mengikuti jalur linear sebagaimana pada era sebelumnya, proses seleksi konten kini berlangsung melalui mekanisme berlapis yang lebih responsif terhadap arus data digital dan keterlibatan publik.

Gambar diagram di atas memperlihatkan bagaimana proses *gatekeeping* saat



Gambar 2.1 Alur *Gatekeeping* Kontemporer

Studi Kasus: Kantor Berita ANTARA

ini tidak hanya mengandalkan pertimbangan editorial, tetapi juga memanfaatkan algoritma untuk mendeteksi topik populer dan tren pencarian. Seleksi awal ini disusul oleh proses kurasi oleh redaktur, yang mempertimbangkan nilai berita dan prinsip etika sebelum memasuki tahap verifikasi yang dibantu oleh teknologi, seperti penggunaan reverse image search atau analisis metadata untuk mendeteksi potensi disinformasi.

1. Penyaringan Hybrid

Di lingkungan Kantor Berita ANTARA, model *gatekeeping* dijalankan melalui sistem *hybrid*. Unit khusus seperti Radar/Viral bertugas memantau dinamika media sosial dan trend daring menggunakan perangkat seperti *CrowdTangle* dan *Google Trends*. Temuan dari proses ini kemudian diseleksi lebih lanjut oleh redaksi berdasarkan standar profesional jurnalistik yang berlaku di institusi tersebut.

Meskipun sistem ini menunjukkan efisiensi, tantangan tetap muncul, terutama dalam bentuk resistensi internal terhadap otomatisasi. Beberapa *jurnalis senior* menunjukkan sikap skeptis terhadap intervensi teknologi dalam praktik editorial, yang dianggap menggeser etos kerja berbasis intuisi dan pengalaman ke arah kuantifikasi dan kecepatan (Carlson, 2018).

2. Tantangan Implementasi

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kantor Berita ANTARA menginisiasi program pelatihan literasi algoritmik yang menasar redaktur dan reporter dari berbagai generasi. Selain itu, dibentuk pula tim lintas usia untuk menjembatani kompetensi digital dan nilai-nilai editorial klasik. Pendekatan ini mencerminkan upaya institusional untuk merespons perubahan digital secara strategis tanpa kehilangan komitmen terhadap akurasi dan integritas konten.

Secara keseluruhan, implementasi *gatekeeping* di ruang redaksi Kantor Berita ANTARA menunjukkan transformasi epistemik: dari seleksi berita yang berbasis intuisi individu ke sistem yang bersifat kolaboratif, terotomatisasi sebagian, dan berbasis pada sinergi antara aktor manusia, mesin, dan dinamika jaringan digital.

3. Solusi Adaptif

Perjalanan historis teori *gatekeeping* mencerminkan upaya adaptif terhadap dinamika perubahan lanskap media, yang beralih dari sistem linier menuju jaringan informasi yang bersifat terdesentralisasi. Jika pendekatan awal menitikberatkan pada subjektivitas individu, maka pendekatan kontemporer mengadopsi perspektif yang lebih kompleks, mencakup aktor manusia maupun non-manusia.

2.4 *Fact-Checking* Di Era Disinformasi

Meningkatnya arus disinformasi mendorong berkembangnya praktik pemeriksaan fakta sebagai mekanisme korektif dalam ekosistem media. Organisasi pemeriksa fakta independen muncul sebagai respons terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama, sekaligus sebagai mitra strategis bagi redaksi dalam menjaga akurasi informasi (Graves & Cherubini, 2016).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kolaborasi antara media berita dan organisasi pemeriksa fakta berkontribusi signifikan dalam memitigasi penyebaran informasi keliru. Namun, sebagian besar penelitian masih memisahkan pembahasan *gatekeeping* dan *fact-checking*, sehingga belum sepenuhnya

menjelaskan dinamika hubungan keduanya dalam konteks organisasi media nasional (Boberg et al., 2018; L. Graves, 2018).

2.4.1 Tipologi Verifikasi

Menanggapi eskalasi kompleksitas disinformasi di ranah digital, dunia jurnalistik telah mengembangkan tiga pendekatan utama dalam verifikasi informasi. Masing-masing pendekatan menawarkan karakteristik spesifik, keunggulan kontekstual, serta tantangan implementatif yang memerlukan dukungan teknologi berbeda.

Tabel 2.5 Tipologi Metode Verifikasi

Tipe	Karakteristik	Keunggulan	Tantangan	Contoh Alat
Reaktif (Graves, 2018)	Klarifikasi pasca-viralisasi	Mencegah perluasan dampak hoaks	Ketergantungan pada kecepatan respons	<i>CrowdTangle, Google Fact Check Tools</i>

Proaktif (Silverman, 2014)	Verifikasi sumber pra-publikasi	Meminimalkan risiko kesalahan	Membutuhkan sumber daya intensif	<i>CheckMark, InVID</i>
Simultan (Brandtzaeg et al., 2021)	Monitoring <i>real-time</i>	Responsif terhadap krisis informasi	Overload data	Semar AI (Kantor Berita ANTARA), Newtral

Model reaktif menekankan kecepatan tanggapan terhadap informasi palsu yang telah terlanjur viral, sementara pendekatan proaktif lebih fokus pada pencegahan sejak hulu dengan memverifikasi konten sebelum dipublikasikan. Strategi simultan hadir sebagai respons atas kebutuhan verifikasi dinamis di tengah krisis—misalnya bencana alam, atau pemilu, dengan menggabungkan kecepatan dan akurasi secara bersamaan.

2.4.2 Teknologi Pendukung Verifikasi

Dalam ekosistem media yang semakin didominasi oleh big data, proses verifikasi informasi menuntut dukungan dari perangkat teknologi berbasis

kecerdasan. Kantor Berita ANTARA telah membangun sistem verifikasi yang mengandalkan integrasi tiga pilar teknologi, yakni *Natural Language Processing* (NLP), *Open-Source Intelligence* (OSINT), dan *Application Programming Interface* (API). Ketiga komponen ini berperan sebagai kerangka utama dalam siklus tertutup yang melibatkan proses deteksi, validasi, dan distribusi informasi yang telah diverifikasi.

a. *Natural Language Processing* (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan salah satu cabang dalam ranah kecerdasan buatan yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia oleh mesin secara otomatis, baik untuk memahami, menganalisis, maupun menghasilkan tuturan secara digital. Dalam praktik jurnalistik, NLP memegang peran sentral untuk menelusuri pola kebahasaan yang dapat mencerminkan adanya bias, *framing* tertentu, atau potensi penyebaran misinformasi di dalam teks berita (Ali et al., 2021). Dengan metode analisis semantik, para jurnalis memperoleh dukungan signifikan dalam mengidentifikasi klaim yang tidak selaras, data yang inkonsisten, atau indikasi framing yang menyesatkan, dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada pemeriksaan manual tradisional.

Contohnya, penelitian (van der Linden et al., 2022) menyoroti pemanfaatan NLP berbasis teori inoculation untuk mendeteksi narasi manipulatif sejak tahap awal, sehingga proses *fact-checking* tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga bersifat preventif dan prediktif. Dalam ekosistem Kantor Berita ANTARA,

teknologi NLP dapat diintegrasikan ke dalam sistem editorial untuk memperkuat prosedur *claim matching*, yakni mencocokkan klaim publik dengan basis data verifikasi secara otomatis. Dengan demikian, NLP tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu validasi, tetapi juga berperan dalam menjaga konsistensi dan akurasi konten di tengah tekanan produksi berita yang semakin cepat pada era digital. Perspektif ini selaras dengan kerangka *algorithmic accountability* (Diakopoulos, 2019), yang menekankan perlunya transparansi teknologi dalam proses editorial.

b. *Open-Source Intelligence* (OSINT)

Open-Source Intelligence (OSINT) mengacu pada seperangkat pendekatan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan memverifikasi data dari domain publik, mencakup dokumen daring, media sosial, metadata, serta jejak digital lain yang tersedia secara terbuka. Dalam praktik jurnalistik, OSINT menghadirkan nilai tambah penting karena mendukung proses verifikasi berbasis bukti, misalnya untuk memastikan keaslian citra visual, rekaman video, lokasi liputan, atau bahkan identitas narasumber (Friedrich et al., 2022).

Dari perspektif media nasional, OSINT memungkinkan redaksi untuk memperluas ruang investigasi, tidak hanya terpaku pada sumber resmi konvensional. Sebagaimana dijelaskan oleh Bhatt et al. (2023), pendekatan multimodal OSINT mampu mengombinasikan analisis visual, tekstual, dan

audio secara terpadu, sehingga lebih efektif dalam membongkar konten palsu, deepfake, maupun narasi yang bersifat manipulatif. Hal ini sejalan dengan prinsip *networked verification* (Wardle & Derakhshan, 2017), yang menekankan kolaborasi multiaktor dan sumber terbuka dalam memerangi misinformasi. Melalui optimalisasi OSINT, Kantor Berita ANTARA dapat memperkuat validitas editorialnya, menekan risiko disinformasi, dan mempertahankan reputasi institusional di mata publik.

c. *Application Programming Interface (API)*

Application Programming Interface (API) di lingkungan Kantor Berita ANTARA berperan sebagai instrumen integrasi data internal, yang menghubungkan basis data editorial, platform verifikasi fakta, dan sistem distribusi berita nasional. Melalui API, Kantor Berita ANTARA dapat mengelola proses pertukaran klaim, metadata, dan hasil pengecekan fakta secara lebih tertata dan efisien di dalam organisasi.

Kendati demikian, penting dicatat bahwa kanal publik Kantor Berita ANTARA Anti Hoaks di antaranews.com tidak menyediakan endpoint API terbuka untuk akses eksternal. Dengan kata lain, publik hanya dapat memperoleh konten hasil verifikasi melalui akses web biasa. Fungsi API tetap digunakan secara terbatas di ruang internal Kantor Berita ANTARA guna memperlancar integrasi lintas aplikasi serta mendukung akurasi editorial dalam ekosistem verifikasi berita.

Dengan pemanfaatan API, tahapan *fact-checking* dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur berkat mekanisme verifikasi lintas platform dan distribusi hasil pengecekan ke berbagai kanal publikasi digital. (Brandtzaeg et al., 2021) mencatat bahwa penerapan API dalam jurnalisme kolaboratif terbukti meningkatkan kualitas serta kecepatan penegasan fakta, terutama di masa krisis seperti pandemi global. Pada konteks Kantor Berita ANTARA, penggunaan API membuka peluang integrasi antara sistem editorial internal dan jejaring pemeriksa fakta nasional, menciptakan proses verifikasi yang responsif, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip *information infrastructure theory* yang menekankan pentingnya ekosistem teknologi kolaboratif sebagai penopang kredibilitas dan keberlanjutan organisasi media.

Integrasi teknologi NLP, OSINT, dan API telah melahirkan kerangka kerja verifikasi yang bersifat adaptif dan dinamis dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Kantor Berita ANTARA memanfaatkan perpaduan antara kompetensi jurnalistik profesional dan sistem kecerdasan buatan untuk membangun sebuah ekosistem verifikasi yang tidak sekadar bersifat kuratif, tetapi juga preventif dalam mengidentifikasi gejala awal disinformasi secara simultan.

Tabel 2.6 Lampiran 2.1 Spesifikasi Tools

Teknologi	Fungsi di Kantor Berita ANTARA	Contoh Tool
NLP	Deteksi klaim palsu	Semar AI, Google Fact Check
OSINT	Validasi gambar/VIDEO	TinEye, InVID
API	Integrasi data eksternal	API CekFakta.com, Kominfo

Pendekatan Kantor Berita ANTARA mencerminkan model *hybrid verification infrastructure*, sebagaimana dijelaskan dalam literatur integrasi *human-machine fact-checking* (Marchi & Clark, 2022).

Verifikasi informasi dalam ruang digital yang dipenuhi big data mengharuskan kolaborasi erat antara keterampilan manusia dan sistem teknologi canggih. Kantor Berita ANTARA menerapkan pendekatan verifikasi triadik yang memadukan NLP, OSINT, dan API sebagai mekanisme utama dalam mendeteksi, mengonfirmasi, dan mendistribusikan informasi secara sistematis dan berlapis melalui suatu siklus tertutup.

Tabel 2.7 Landasan Teori Teknologi Verifikasi

Teknologi	Teori Pendukung	Relevansi untuk ANTARA
NLP	<i>Computational Journalism</i> (Diakopoulos, 2019)	Analisis bahasa Indonesia yang kompleks (Ambarsari et al., 2022)
OSINT	<i>Networked Fact-Checking</i> (Graves, 2018)	Mitigasi hoaks visual di media sosial (Iswara, 2023)
API	<i>Information Infrastructure</i> (Star & Ruhleder, 1996)	Integrasi dengan database Kominfo/BNPB

Alasan Kantor Berita ANTARA Memilih NLP-OSINT-API

- NLP (Semar AI)

Bahasa Indonesia dikenal memiliki nuansa semantik yang bergantung pada konteks pemakaian. Kata seperti "pembangunan," misalnya, dapat ditafsirkan sebagai bentuk kemajuan atau, dalam kondisi tertentu, menjadi simbol kritik terhadap ketimpangan kebijakan.

Penelitian (M. Ardi et al., 2023) menyoroti keefektifan NLP dalam mendeteksi disinformasi politik dengan kecenderungan linguistik tertentu.

- **(OSINT) Open-Source Intelligence**

Mengacu pada pendekatan investigatif yang memanfaatkan berbagai sumber data terbuka, termasuk metadata digital, data geospasial, serta jejak aktivitas daring. OSINT memiliki nilai strategis yang tinggi dalam

konteks verifikasi visual, karena memungkinkan identifikasi keaslian gambar atau video melalui analisis metadata dan validasi silang terhadap sumber resmi. Beberapa perangkat yang kerap digunakan dalam praktik OSINT, seperti *InVID*, *TinEye*, dan *Google Reverse Image Search*, telah menjadi bagian integral dalam ekosistem pemeriksaan fakta digital (Bazzell, 2022).

- **(API) Application Programming Interface**

Berperan sebagai penghubung yang memungkinkan sistem internal terintegrasi secara langsung dengan berbagai sumber data eksternal, seperti *Google Fact Check Tools*, *CekFakta.com*, maupun platform verifikasi lainnya. API berfungsi mempercepat proses validasi informasi dengan menyinkronkan secara otomatis klaim, status verifikasi, dan labelisasi konten. Hal ini mempermudah penyebaran cepat atas informasi yang telah terverifikasi. Selain itu, pemanfaatan API juga mendukung pembuatan dasbor berbasis data real-time yang berguna untuk memantau dinamika narasi hoaks yang sedang berkembang (Diakopoulos, 2019).

INPUT DATA → [NLP: Deteksi anomaly] → [OSINT: Validasi metadata] → [API: Integrasi database] → OUTPUT TERVERIFIKASI

Bagan 2.2 Siklus Verifikasi Kantor Berita ANTARA

[INPUT DATA]

↓

[NLP: Deteksi pola linguistik abnormal & klaim palsu]

↓

[OSINT: Validasi metadata dan sumber terbuka]

↓

[API: Sinkronisasi ke database internal & Kominfo]

↓

[HASIL VERIFIKASI + INDIKATOR KREDIBILITAS]

Ilustrasi Komparatif Tipologi:

[Kecepatan Respon] Reaktif > Simultan > Proaktif

[Akurasi Konten] Proaktif > Simultan > Reaktif

- NLP digunakan untuk mendeteksi klaim bermuatan hoaks melalui pola linguistik dan anomali naratif, seperti frasa hiperbolik atau istilah alarmistik.
- OSINT memverifikasi keabsahan konten visual (gambar/video) melalui metadata dan analisis silang dengan sumber terbuka seperti *TinEye* atau *Google Reverse Image*.
- API menghubungkan sistem internal Kantor Berita ANTARA dengan database eksternal seperti CekFakta.com, sehingga hasil verifikasi dapat disinkronkan secara otomatis.

Contoh Empiris: Hoaks Gempa Lombok 2023

- Deteksi NLP: Kemunculan frasa "gempa dahsyat" dan "ribuan korban jiwa"

(NLP untuk Deteksi Dini : Analisis sentimen dan pola narasi hoaks politik menggunakan bahasa Indonesia (M. Ardi et al., 2023)

- Verifikasi OSINT: Analisis silang dengan dokumentasi BNPB

(Studi Kasus: Investigasi foto bencana palsu dengan *Google Reverse Image Search* dan *TinEye*)

- Hasil: Klarifikasi diterbitkan dalam dua jam setelah deteksi

(Kantor Berita ANTARA mengintegrasikan hasil cek fakta dengan portal CekFakta.com melalui API khusus.)

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis teknologi seperti yang diimplementasikan Kantor Berita ANTARA menunjukkan bagaimana verifikasi digital dapat dilakukan secara adaptif dan sistematis. Dalam konteks meningkatnya skala dan kecepatan produksi disinformasi, sistem ini menjadi pondasi krusial dalam menjaga keakuratan informasi dan kepercayaan publik terhadap media.

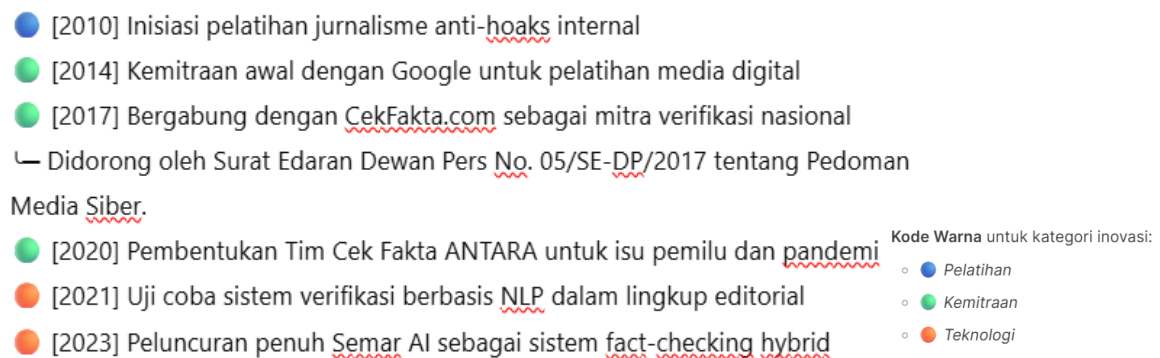
Evaluatif: Efektivitas Strategi Simultan

Strategi simultan terbukti krusial dalam menangani informasi viral berbasis krisis. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kompetensi personel dalam menangani data secara real-time.

Dengan demikian, sistematisasi *Fact-Checking* di era disinformasi tidak hanya memerlukan strategi yang adaptif dan responsif, tetapi juga ekosistem teknologi yang dapat menjamin akurasi, kecepatan, dan keterhubungan lintas sumber.

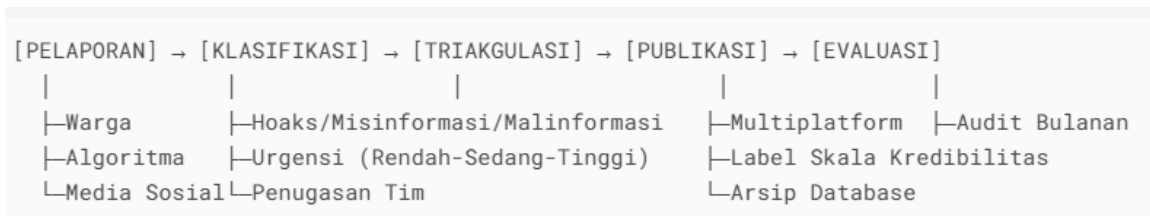
2.4.3 Sistematisasi *Fact-Checking* di Kantor Berita ANTARA

Kantor Berita ANTARA menerapkan sistem verifikasi yang beroperasi melalui jalur kerja yang sistematis dan terpadu, dimulai dari pelaporan awal, penentuan klasifikasi, penyilangan data melalui triangulasi, hingga tahap publikasi dan evaluasi rutin. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi metodologis dan transparansi prosedural dalam menangani arus informasi yang kompleks.



Gambar 2.2a : *Timeline* Kebijakan dan Inovasi *Fact-Checking* Kantor Berita ANTARA 2010-2023

Rangkaian peristiwa dalam linimasa ini menunjukkan proses institusionalisasi strategi *fact-checking* Kantor Berita ANTARA yang bersifat progresif. Berawal dari pelatihan jurnalisme konvensional, Kantor Berita ANTARA melangkah menuju penguatan kelembagaan melalui aliansi dengan mitra strategis dan adopsi teknologi. Keikutsertaan dalam CekFakta.com pada 2017 merupakan fase kunci yang mendorong transformasi dari metode verifikasi yang bersifat responsif ke arah pendekatan terstruktur dan berjejaring luas.



Gambar 2. 3 Alur Sistematis Verifikasi Kantor Berita ANTARA

Model kerja ini menegaskan pentingnya praktik verifikasi yang terstandar, yang didesain untuk memberikan respons cepat terhadap situasi krisis serta fleksibel terhadap dinamika temporal dan keberagaman platform digital. Tahap klasifikasi berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal untuk menentukan urgensi serta tingkat relevansi suatu isu, yang kemudian diperkuat dengan proses triangulasi berbasis lintas sumber dan dukungan teknologi verifikasi seperti NLP dan OSINT, sebagaimana diuraikan dalam bagian 2.4.2.

Tabel 2.8 Standar Verifikasi Kantor Berita ANTARA vs IFCN

Kriteria	Kantor Berita ANTARA	Standar IFCN
Sumber Minimal	2 sumber independen + 1 dokumen	2 sumber independen
Waktu Respons	<4 jam (isu kritis)	<24 jam
Keterbukaan Metode	Publikasikan alat verifikasi	Wajib lampirkan metodologi

Contoh Implementasi: Pilpres 2024

- Klasifikasi: High urgency (kategori politik)
- Triangulasi: Wawancara Bawaslu + verifikasi rekaman KPU + reverse image search
- Publikasi: Label "Telah Diverifikasi" pada Instagram & WhatsApp Channel Kantor Berita ANTARA

Tahap triangulasi dalam alur ini memanfaatkan teknologi NLP dan OSINT sebagaimana dijelaskan dalam 2.4.2. Sementara itu, keseluruhan sistematisasi ini akan dikaji lebih lanjut dalam kerangka "*hybrid verification system*" pada bagian 2.6.

2.5 Konteks Organisasi : Kantor Berita ANTARA

Sebagai institusi berita nasional dengan tanggung jawab strategis dalam penyebaran informasi negara, Kantor Berita ANTARA menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai penyedia konten dan pengawal integritas informasi di ruang digital. Untuk menelusuri dinamika sistem verifikasi yang dikembangkan, perlu dilakukan penelusuran atas evolusi sejarah dan konfigurasi kelembagaan Kantor Berita ANTARA.

Perubahan struktur kelembagaan Kantor Berita ANTARA diikuti pula oleh upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas *fact-checking* (Gambar 2.3a). Dimulai dari pelatihan anti-hoaks pada tahun 2010 hingga adopsi Semar AI pada 2023, perjalanan ini memperlihatkan strategi bertingkat yang menekankan kesinambungan dan adaptabilitas terhadap tantangan disinformasi digital.

2.5.1 Kronologi Kritis Dan Evolusi Kelembagaan ANTARA

Sebagai media legacy nasional, Kantor Berita ANTARA menghadapi tekanan struktural untuk beradaptasi dengan ekosistem media digital yang semakin cepat dan kompetitif. Di satu sisi, Kantor Berita ANTARA dituntut mempertahankan standar etika dan kredibilitas jurnalistik, sementara di sisi lain harus merespons tuntutan kecepatan dan volume informasi yang meningkat. Kondisi ini menempatkan Kantor Berita ANTARA pada posisi strategis dalam mengembangkan model verifikasi yang mengombinasikan proses editorial konvensional dengan teknologi digital.

Tabel 2.9 Evolusi ANTARA Dari Masa Ke Masa

Tahun	Peristiwa Kunci
1937	Pendirian oleh para pejuang kemerdekaan sebagai respons terhadap dominasi berita kolonial.
1945	Berperan krusial dalam menyebarkan teks Proklamasi Kemerdekaan ke dunia internasional.
1962	Ditetapkan sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) melalui Keputusan Presiden.
2007	Bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) ANTARA untuk memperkuat struktur legal dan bisnis.

2023	Mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan seperti Semar AI dalam proses verifikasi.
------	---



Adam Malik



Soemanang



A.M. Sipahoetar



Pandoe Kartawigoeana

Kantor Berita ANTARA telah mengalami evolusi institusional yang signifikan, selaras dengan dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Setiap periode dalam Sejarah Kantor Berita ANTARA mencerminkan perubahan mendasar dalam fungsinya sebagai lembaga komunikasi, baik sebagai alat negara maupun pelaku dalam ekosistem informasi publik.

Evolusi Kantor Berita ANTARA dari masa ke masa menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi pasar, tetapi juga mengemban tanggung jawab strategis sebagai corong utama penyebaran informasi negara secara sah dan terstruktur.

Kantor Berita ANTARA telah mengalami evolusi institusional yang signifikan, selaras dengan dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Setiap periode dalam Sejarah Kantor Berita ANTARA mencerminkan perubahan mendasar dalam fungsinya sebagai lembaga komunikasi, baik sebagai alat negara maupun pelaku dalam ekosistem informasi publik.

Tahapan Historis Utama:

- Periode Pra-Kemerdekaan (1937–1945)

Didirikan sebagai media perlawanan kolonial, Kantor Berita ANTARA memainkan peran kunci dalam menyuarakan kepentingan nasional meskipun beroperasi dalam keterbatasan teknologi komunikasi saat itu.

- Masa Sentralisasi Negara (1962–2007)

Penetapan Kantor Berita ANTARA sebagai LKBN memperkuat posisinya sebagai penyambung lidah pemerintah. Praktik penyaringan informasi pada masa ini mencerminkan model *gatekeeping* yang hierarkis dan terstruktur secara vertikal.

- Era Digital dan Reformasi (2007–kini)

Dengan perubahan kelembagaan menjadi Perum dan dorongan untuk beradaptasi terhadap digitalisasi, Kantor Berita ANTARA mulai menerapkan teknologi canggih seperti Semar AI dalam proses editorial untuk mengelola tantangan disinformasi secara lebih efisien.

Kritik terhadap Model *Gatekeeping* Tradisional dan Evolusi ke Model Hybrid

Model *gatekeeping* klasik yang diperkenalkan oleh White (1950) menempatkan jurnalis sebagai aktor sentral dalam menyaring informasi untuk publikasi. Meskipun relevan pada masanya, pendekatan ini kini dianggap kurang memadai dalam menghadapi dinamika era digital, di mana algoritma, otomatisasi, dan tekanan dari media sosial turut menentukan arus informasi. Dalam kasus Kantor Berita ANTARA, keterbatasan model White tampak dari lambannya respons terhadap penyebaran disinformasi secara daring. Untuk menjawab tantangan

tersebut, Kantor Berita ANTARA mengadopsi model hibrida yang memadukan seleksi editorial oleh manusia dengan dukungan teknologi verifikasi otomatis—seperti *Natural Language Processing* (NLP) dan *Open Source Intelligence* (OSINT)—guna meningkatkan efisiensi serta akurasi proses seleksi informasi.

Integrasi dengan Sistem Editorial: Model Hibrida *Gatekeeping–Fact-Checking*

Sebagai respons terhadap meluasnya disinformasi, Kantor Berita ANTARA menerapkan sistem kerja yang menggabungkan pendekatan *gatekeeping* tradisional dengan teknologi verifikasi digital. Strategi ini dikenal sebagai "model hibrida," yakni sebuah sistem yang menyinergikan kewenangan editorial manusia dengan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan dalam satu rangkaian kerja redaksional.

Untuk menjawab tantangan verifikasi informasi di era digital, Kantor Berita ANTARA mengimplementasikan pendekatan integratif yang memadukan fungsi *gatekeeping* konvensional dengan dukungan teknologi berbasis AI. Model kerja ini dikenal sebagai model hibrida karena menggabungkan peran redaktur dengan mesin cerdas dalam satu proses editorial yang saling melengkapi.

Alasan Pentingnya Model Hibrida

Menjawab Tantangan Big Data: Model *gatekeeping* tradisional tidak lagi memadai dalam mengelola volume, kecepatan, dan keragaman konten di ruang

digital. Sebagai contoh, hoaks politik dapat menyebar dalam hitungan menit, sementara verifikasi manual memerlukan waktu yang jauh lebih lama.

Sinergi Manusia–Teknologi: Integrasi NLP, OSINT, dan API dalam proses

Input (konten mentah) → Seleksi algoritmik (NLP) → *Gatekeeping* redaksi → Verifikasi multi-sumber → *Output* (konten terverifikasi)

seleksi konten memungkinkan efisiensi kerja redaksional. Di Kantor Berita ANTARA, algoritma NLP digunakan untuk mendeteksi klaim mencurigakan yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh editor.

Relevansi Kontekstual: Sebagai kantor berita nasional, Kantor Berita ANTARA memiliki tanggung jawab untuk menggabungkan validasi editorial dan teknologi canggih agar tetap menjadi sumber informasi terpercaya.

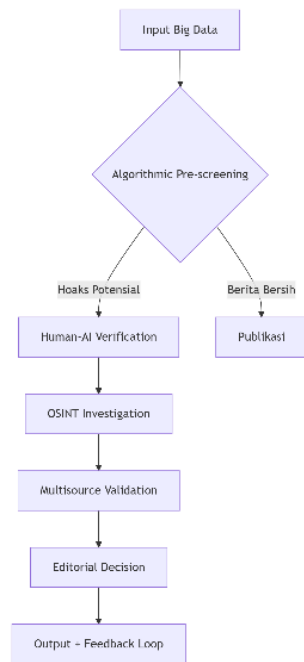
Dukungan Teoretis: Pendekatan ini selaras dengan *theory of computational gatekeeping* (Wallace, 2018) dan kerangka *hybrid verification systems* (Graves, 2018), yang menekankan pentingnya kolaborasi manusia dan mesin dalam penyaringan informasi.

Definisi Kerja Model Hibrida

Bagan 2.3 Alur Model Hibrida

Model ini dapat dijabarkan dalam alur berikut:

Diagram 2.1 Alur Model Hibrida



Bagan 2. 4 Alur Kerja Verifikasi Hibrida di Kantor Berita ANTARA

Implementasi di Kantor Berita ANTARA

- **Tools:** Semar AI (deteksi klaim), integrasi CekFakta API, *Google Fact-Check Tools*.

Deteksi Awal (NLP - Semar AI) → Klasifikasi Kasus (JACX) → Triangulasi Sumber (OSINT/API) → Verifikasi Redaksional → Labelisasi → Publikasi Multi-Platform (Website, WhatsApp, Instagram)

- **Kolaborasi:** Kemitraan dengan MAFINDO dan CekFakta.com.

- **Dampak:** Penurunan waktu verifikasi dari 6 jam (2021) menjadi 2 jam (2023), sesuai laporan internal Kantor Berita ANTARA.

Kelebihan dan Tantangan

- **Kelebihan:** Efisiensi kerja, skalabilitas, peningkatan akurasi melalui deteksi awal.
- **Tantangan:** Resistensi sebagian redaktur senior, risiko bias algoritmik, dan kebutuhan pelatihan rutin.

Integrasi model hybrid ini menjadi bagian dari kerangka konseptual yang lebih luas (dibahas pada 2.6), yang menempatkannya sebagai respons adaptif terhadap kompleksitas big data dan disinformasi digital.

Contoh Penerapan Lain Teknologi Verifikasi

Selain Pilpres 2024, implementasi teknologi verifikasi di Kantor Berita ANTARA juga memainkan peran penting dalam menanggulangi penyebaran hoaks visual saat bencana banjir di Kalimantan pada awal tahun 2023. Dalam kasus ini, Semar AI berhasil mengidentifikasi sebuah gambar sebagai hasil manipulasi digital, di mana foto tersebut diklaim sebagai peristiwa terkini padahal sebenarnya berasal dari bencana pada tahun 2014. Teknologi OSINT kemudian digunakan untuk menelusuri metadata visual dan mencocokkannya dengan data resmi dari BNPB. Proses ini memungkinkan klarifikasi dipublikasikan dalam kurun waktu kurang dari empat jam sejak konten tersebut menyebar di media sosial. Namun demikian, insiden ini juga menyingkap keterbatasan sistem: duplikasi konten dalam bentuk

teks tidak berhasil terdeteksi secara otomatis dan baru dapat ditindaklanjuti setelah dilakukan intervensi manual oleh tim redaksi.

2.5.2 Struktur Proses Editorial Dan Verifikasi

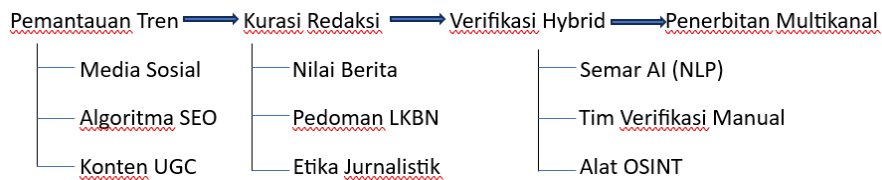
Sistem kerja editorial di Kantor Berita ANTARA dirancang secara terintegrasi, mencakup rangkaian proses yang dimulai dari pemasukan data mentah hingga penerbitan berita yang telah melalui tahapan verifikasi. Prosedur ini diperkuat oleh unit-unit internal seperti Radar Kantor Berita ANTARA serta divisi pemeriksa fakta berbasis teknologi canggih, yaitu JACX (Jaring ANTARA Anti Hoax).

INPUT (Reporter, Stringer, [Agensi](#)) → VERIFIKASI (Radar ANTARA / [JACX](#)) →
EVALUASI ETIS (Ombudsman Redaksi) → PUBLIKASI OUTPUT (Portal, *Feeder*
Newsroom, API)

Bagan 2.5 Alur Proses Editorial Verifikasi ANTARA

- **Radar ANTARA** berfungsi sebagai unit awal deteksi konten raw yang mengandung klaim problematis.
- **JACX** (Jaringan ANTARA Cegah Hoax) menggunakan kombinasi Scraping media sosial, pemetaan trending topic, dan modul AI Semar untuk menyaring informasi mencurigakan.
- **Ombudsman Redaksi** melakukan tinjauan etik dan memastikan narasi yang terverifikasi tetap sesuai dengan standar jurnalistik dan nilai kebangsaan.

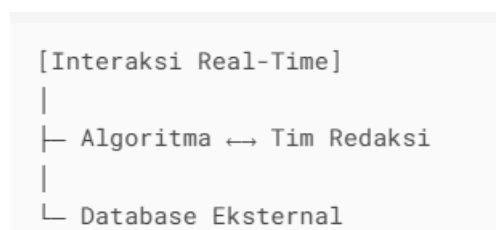
Konteks kelembagaan ini menegaskan bahwa Kantor Berita ANTARA telah melampaui sekadar penerapan prosedur editorial konvensional dengan mengadaptasi sistem verifikasi digital serta melibatkan berbagai aktor lintas disiplin dalam ekosistem redaksional untuk merespons tantangan disinformasi kontemporer.



Gambar 2.4 Mekanisme Editorial di Kantor Berita ANTARA Tahun 2023

A. Inovasi Utama:

- **Verifikasi Hybrid** : Kantor Berita ANTARA mengintegrasikan kekuatan Semar AI untuk mempercepat deteksi dan validasi informasi lintas platform. Teknologi ini memungkinkan klasifikasi otomatis terhadap berita meragukan dan menyinkronkannya dengan sumber kredibel secara real-time.



- **Distribusi Lintas Platform** : Konten hasil verifikasi dipublikasikan secara simultan di kanal web dan media sosial. Data performa menunjukkan bahwa klarifikasi yang diterbitkan di Instagram memiliki tingkat interaksi 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan versi yang sama di situs utama.

Sistem pemantauan berbasis big data digunakan untuk mengidentifikasi potensi disinformasi selama momen-momen kritis seperti Pemilu 2024, memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi.

B. Tantangan Struktural:

- Resistensi SDM: Survei internal Kantor Berita ANTARA (2023) menunjukkan bahwa 47% redaktur senior menyatakan kekhawatiran terhadap peningkatan otomatisasi dalam proses editorial.
- Infrastruktur: Implementasi teknologi verifikasi modern memerlukan alokasi anggaran rata-rata Rp.2,1 miliar per tahun untuk pemeliharaan server, lisensi perangkat lunak, dan pelatihan teknis berkelanjutan.

C. Bukti Efektivitas

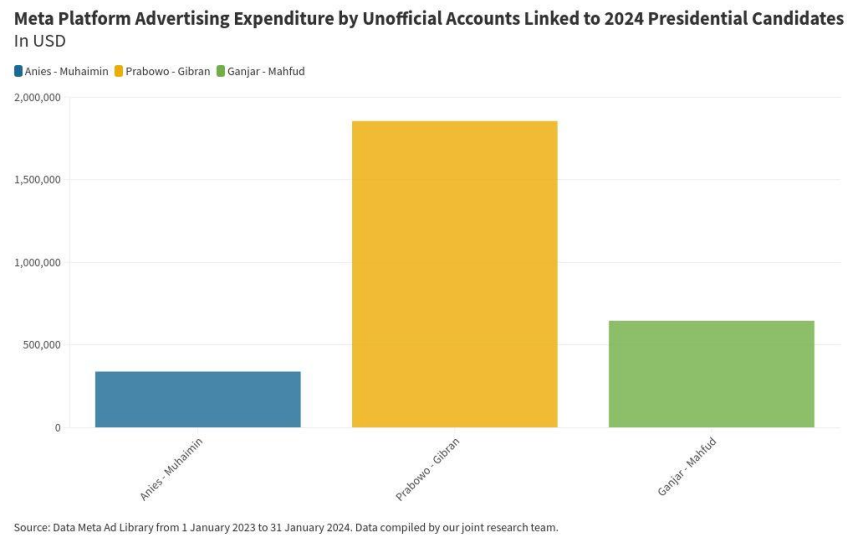
- Studi Kasus Pemilu 2024: Dalam kasus hoaks terkait hasil penghitungan suara, Kantor Berita ANTARA berhasil mengklarifikasi narasi yang menyesatkan hanya dalam kurun waktu 3 jam, didukung oleh integrasi Semar AI dan unit JACX.

Ilustrasi Kasus: Disinformasi Pemilu 2024

Melalui deteksi gabungan dari Semar AI dan OSINT tools, Kantor Berita ANTARA berhasil mengidentifikasi dan mengklarifikasi hoaks terkait Pilpres hanya

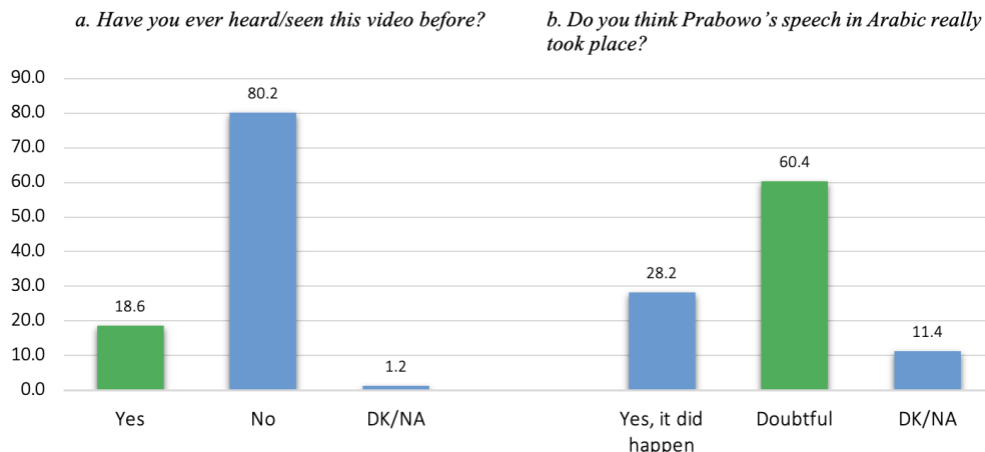
dalam waktu tiga jam, menegaskan peran strategis lembaga ini dalam ekosistem verifikasi nasional.

Secara keseluruhan, proses transformasi di tubuh Kantor Berita ANTARA menandai pergeseran dari model media pemerintah konvensional menjadi entitas yang proaktif dan adaptif dalam menghadapi tantangan komunikasi era digital.



Gambar 2.5 Perbandingan Sebaran Narasi Hoaks & Verifikasi *Real-Time*

Gambar 2.5 menunjukkan jumlah unggahan konten misinformasi pada platform digital (Twitter, Facebook), diikuti dengan aktivitas *fact-checking* oleh jaringan seperti ANTARA–MAFINDO–CekFakta dalam siklus respons cepat.



Gambar 2.6 Skor Eksposur dan Kepercayaan *Deepfake*

Gambar 2.6 memperlihatkan persentase responden yang terkena dan mempercayai dua *deepfake* politik (Surya–Anies dan Prabowo–Arab). Ini menunjukkan eksposur selektif dan potensi kerentanan audiens terhadap konten manipulatif.



PERSONAL RESPONSES TO HOAXES

SURVEY OF 10 THOUSAND INDONESIANS

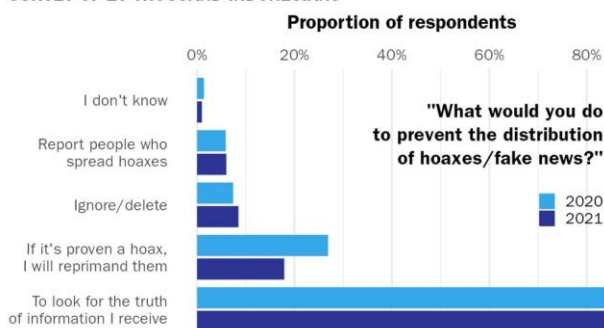


CHART: James Goldie, 360Info

SOURCE: Katadata Insight Center (2021). Status Literasi Digital di Indonesia.



Gambar 2.7 Tipe Hoaks yang Terdeteksi Antivirus

Gambar 2.7 mengilustrasikan beragam kategori misinformasi selama kampanye Pilpres 2024. Perlu ada keselarasan antara waktu tanggap cepat

ANTARA dan pola dominan isi hoaks politik (~62%), agar strategi verifikasi tepat

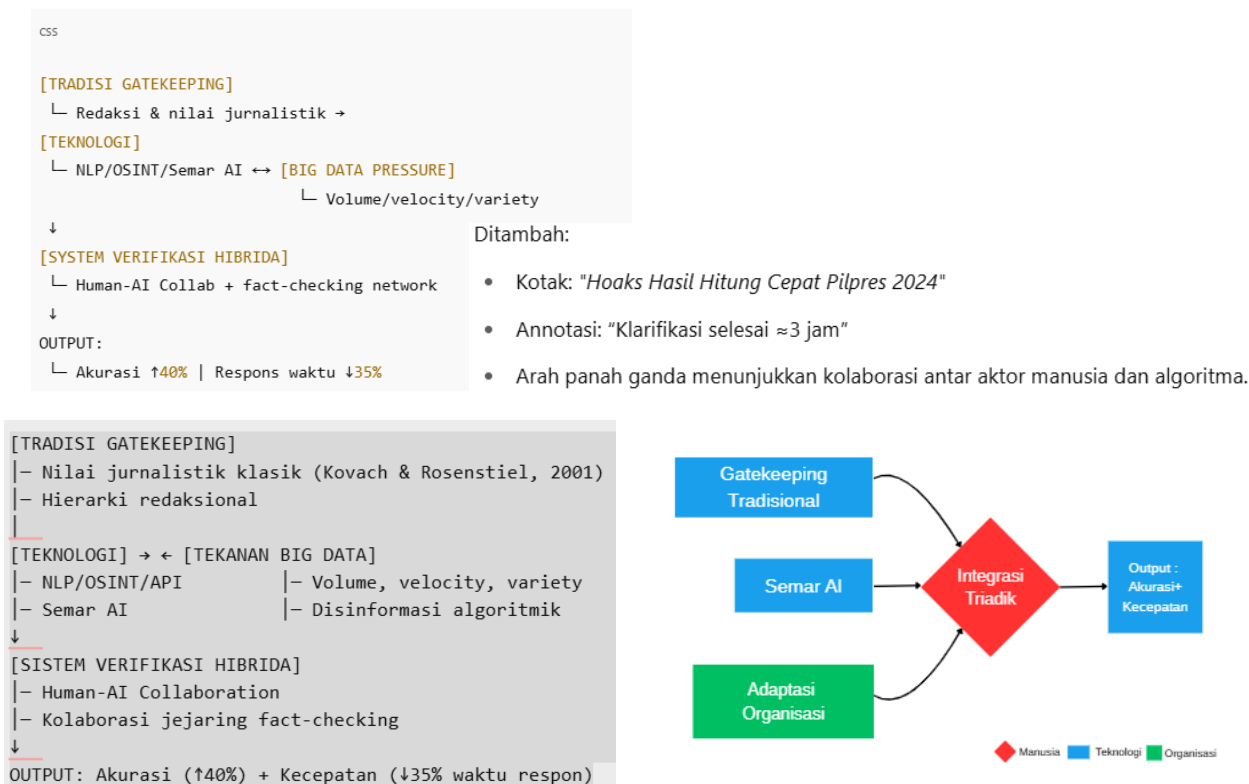


Diagram 2.2 Integrasi Triadik Sistem Verifikasi

Hipotesis ini berangkat dari asumsi bahwa sinergi antara tiga dimensi utama—yakni tradisi *gatekeeping* redaksional, adopsi teknologi digital, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi—berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas proses verifikasi di Kantor Berita ANTARA. Peningkatan ini ditaksir berada pada kisaran 30 hingga 40 persen, khususnya bila diukur melalui indikator kecepatan dan akurasi sebagaimana dirujuk oleh tolok ukur MAFINDO (MAFINDO, 2023). Temuan ini mengindikasikan terjadinya pergeseran mendasar dari pola media pemerintah yang konvensional menuju model kelembagaan yang lebih responsif dan adaptif dalam menjawab tantangan komunikasi di era digital.

2.5.3 Proporsi Penelitian

Sebagai penghubung antara kerangka teoritis dan tahapan pengujian empiris, bagian ini menyajikan tiga proposisi utama yang dirumuskan berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara redaksional, serta integrasi wacana akademik. Ketiga proposisi ini merepresentasikan realitas implementasi sistem verifikasi hibrida dalam praktik jurnalistik Kantor Berita ANTARA.

Kontekstualisasi Proposisi

P1 dan P2 muncul dari hasil wawancara mendalam dengan 10 redaktur senior Kantor Berita ANTARA yang mengungkapkan adanya fragmentasi standar verifikasi setelah adopsi sistem AI. P3 mencerminkan hasil pengamatan atas konten viral selama Pilpres 2024, yang menunjukkan adanya pergeseran penekanan dari akurasi menuju daya jangkau dan engagement publik.

Rumusan Proposisi

- P1: Implementasi NLP meningkatkan kecepatan deteksi 40%, tetapi menurunkan akurasi kontekstual.
- P2: Fragmentasi otoritas verifikasi memperlemah konsistensi output.
- P3: Tekanan viralitas menggeser kriteria "nilai berita" dari akurasi ke engagement.

Tabel 2. 10 Dampak dan Solusi Potensial dari Proposisi

Proposisi	Dampak Positif	Dampak Negatif	Solusi Potensial
P1 (NLP)	Deteksi cepat hoaks	Interpretasi konteks melemah	Verifikasi hybrid (NLP + manusia)
P2	Desentralisasi pengawasan	Ketidakkonsistenan pelabelan	Standarisasi internal
P3	Peningkatan engagement	Reduksi prioritas akurasi faktual	Edukasi algoritmik dan pelatihan etis

Keterkaitan dengan Hipotesis

- P1 dan P2 relevan dengan Hipotesis H1 dalam 2.6.5, yaitu: "Sinergi teknologi dan budaya organisasi menentukan efektivitas sistem verifikasi."
- P3 berhubungan dengan Hipotesis H2, yang menyoroti: "Tekanan viralitas memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas media."

Kritik dan Refleksi

Perlu dicatat bahwa ketiga proposisi ini belum mengukur secara longitudinal dampaknya terhadap kredibilitas Kantor Berita ANTARA di mata publik. Oleh karena itu, validasi lebih lanjut diperlukan melalui studi lapangan dan analisis tren kepercayaan masyarakat.

Paragraf ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang menyatukan beragam teori komunikasi dan temuan lapangan guna memahami praktik verifikasi

informasi digital di Kantor Berita ANTARA. Sintesis teoritis ini menjalin keterhubungan antara teori jurnalistik tradisional seperti *gatekeeping* dengan penerapan teknologi mutakhir seperti NLP, OSINT, dan API dalam kerangka kelembagaan media nasional. Tujuannya adalah untuk menyediakan fondasi analitis dalam merumuskan hipotesis dan memetakan interaksi antara aktor manusia, perangkat teknologi, serta struktur organisasi dalam proses verifikasi hybrid.

2.5.4 Posisi Antara Dalam Ekosistem Informasi Nasional

Sebagai lembaga kantor berita resmi milik negara, Kantor Berita ANTARA menempati posisi strategis dalam struktur komunikasi massa Indonesia. Peran utamanya meliputi produksi, agregasi, serta distribusi informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui jejaring media lokal, nasional, dan internasional. Posisi ini menguatkan Kantor Berita ANTARA sebagai simpul utama dalam sistem informasi nasional, sebagaimana dipahami melalui lensa teori sistem media oleh (Hallin & Mancini, 2004).

Dengan jaringan biro yang tersebar di seluruh provinsi serta afiliasi dengan kantor berita dunia, Kantor Berita ANTARA berfungsi sebagai penghubung antara wacana domestik dan global. Dalam era digital, Kantor Berita ANTARA mengembangkan kanal distribusi multimedia yang memungkinkan jangkauan informasi lebih luas dan tersegmentasi. Kerja sama dengan instansi pemerintah,

BUMN, media lokal, serta perwakilan Indonesia di luar negeri, memperluas daya sebar informasi ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan komunitas diaspora.

Transformasi digital di Kantor Berita ANTARA juga mencakup penggunaan analitik data dalam produksi informasi, menjadikannya institusi yang mampu menggabungkan praktik jurnalistik klasik dengan pendekatan berbasis data. Hal ini memungkinkan Kantor Berita ANTARA untuk menghasilkan konten yang tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan informasi hiperaktual.

Dalam perspektif (McNair, 2017), media negara memainkan peran penting dalam demokrasi hibrid sebagai penyeimbang terhadap dominasi algoritmik dalam distribusi informasi. Kantor Berita ANTARA, dalam hal ini, bukan sekadar entitas jurnalistik, tetapi juga aktor kebijakan informasi yang menjaga stabilitas dan kesehatan ekosistem komunikasi nasional.

2.6 Kerangka Konseptual Dan Sintesis Teoritis

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan teori *gatekeeping* dan praktik *fact-checking* dalam perspektif sistem sosio-teknis. Pendekatan ini memandang teknologi dan aktor manusia sebagai elemen yang saling bergantung dalam proses verifikasi informasi. Kerangka *socio-technical systems* menegaskan bahwa efektivitas sistem verifikasi tidak hanya ditentukan

oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh struktur organisasi, budaya kerja, dan kapasitas sumber daya manusia (Emery & Trist, 1965).

Integrasi *gatekeeping* dan *fact-checking* menghasilkan model verifikasi hibrida yang lebih adaptif terhadap tantangan disinformasi berbasis big data. Dalam kerangka ini, teknologi seperti NLP, OSINT, dan API berfungsi sebagai alat pendukung yang memperkuat proses seleksi dan validasi informasi tanpa menggantikan peran profesional jurnalis (Diakopoulos, 2019; Graves, 2018).

Teknologi NLP memungkinkan pendeteksian pola bahasa yang menampilkan misinformasi atau framing manipulatif, sedangkan OSINT memperluas kemampuan menelusuri fakta melalui sumber terbuka dan metadata publik. Pada saat yang sama, API menjadi infrastruktur krusial agar proses validasi lintas sistem dapat berjalan cepat dan responsif. Dengan rangkaian ini, terbentuklah sebuah hybrid verification system yang memadukan kapasitas profesional jurnalis dengan kecanggihan teknologi.

Teori *socio-technical systems* (Emery & Trist, 1965) memberikan fondasi bahwa transformasi newsroom hanya akan efektif jika keseimbangan antara teknologi, nilai, budaya organisasi, dan profesionalisme jurnalis tetap terjaga. Diperkaya oleh *organizational learning theory* (Argyris & Schön, 1978), inovasi di newsroom dipahami tidak sekadar adaptasi teknis, melainkan juga sebagai

proses pembelajaran kolektif agar wartawan dapat mempertahankan etika, akurasi, dan independensi di tengah lingkungan informasi yang kian kompleks.

Berdasarkan sintesis teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan Kantor Berita ANTARA sebagai entitas yang tengah bernegosiasi antara nilai-nilai *gatekeeping* klasik dan praktik verifikasi modern, demi membangun kerangka *eco-systemic verification* yang berfokus pada akurasi, kecepatan, serta kredibilitas. Kerangka konseptual yang dirumuskan kemudian memetakan hubungan antara proses editorial tradisional, pemanfaatan teknologi NLP, OSINT, API, konteks organisasi (termasuk struktur, budaya, dan strategi adaptasi), serta dinamika ekosistem informasi digital nasional ke dalam satu konstruksi integratif, yang ditujukan untuk memahami strategi Kantor Berita ANTARA dalam memitigasi disinformasi di era big data.

Konsep media *ecology theory* (Postman & Weingartner, 1970) juga dapat menambah daya jelajah konseptual, dengan menekankan bahwa setiap teknologi komunikasi menciptakan ekosistem budaya dan nilai, yang kemudian memengaruhi pola produksi serta konsumsi informasi dalam masyarakat.

Karakteristik Big Data dan Relevansinya terhadap Proses Verifikasi

Dalam ranah jurnalistik, big data ditandai oleh lima karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V: *Volume* (jumlah data yang masif), *Velocity* (kecepatan arus informasi), *Variety* (keragaman format data), *Veracity* (tingkat keandalan informasi),

dan *Value* (manfaat informatif). Di lingkungan kerja Kantor Berita ANTARA, tantangan utama muncul dari *volume* dan *velocity*, terutama saat harus menghadapi persebaran hoaks politik yang berlangsung dalam hitungan menit. Sementara itu, dimensi *veracity* menuntut validasi bertingkat untuk menjaga akurasi. (Lazer et al., 2018) mencatat bahwa tekanan untuk merespons cepat dalam ekosistem big data sering kali mendorong media membuat keputusan yang dapat mengorbankan ketepatan informasi.

2.6.1 Integrasi Teori *Gatekeeping* dan *Fact-Checking*

- a. Konvergensi Praktik Editorial dan Teknologi seperti NLP dan OSINT telah menjadi bagian integral dari proses penyaringan konten di Kantor Berita ANTARA. Misalnya, algoritma Semar AI digunakan untuk menyaring konten visual manipulatif yang kemudian diverifikasi oleh tim JACX.
- b. Model Hibrida *Gatekeeping* dan *Fact-Checking* Pendekatan Kantor Berita ANTARA merefleksikan pergeseran dari model *gatekeeping* tradisional menuju sistem verifikasi hibrida. Teori *hybrid verification systems* (Graves, 2018) menjelaskan pentingnya sinergi antara filter editorial manusia dan mekanisme deteksi berbasis mesin.

2.6.2 Validasi Fakta Dalam Konteks Big Data

- a. Strategi Multi-Sumber dan Verifikasi Lintas-Platform Kantor Berita ANTARA mengandalkan triangulasi dari berbagai sumber seperti BPS, lembaga pemerintah, dan mitra seperti MAFINDO. Namun, penggunaan sumber resmi terkadang memperkuat bias institusional.
- b. Infrastruktur Teknologis untuk Verifikasi Cepat dan Akurat Dashboard pemantauan media sosial dan integrasi API dengan database Kominfo menjadi elemen penting dalam mendeteksi hoaks secara cepat. Tantangan utama mencakup kebutuhan bandwidth tinggi dan kapasitas komputasi.

2.6.3 Kerangka Epistemologis dan Metodologis: Paradigma *Post-Positivis*

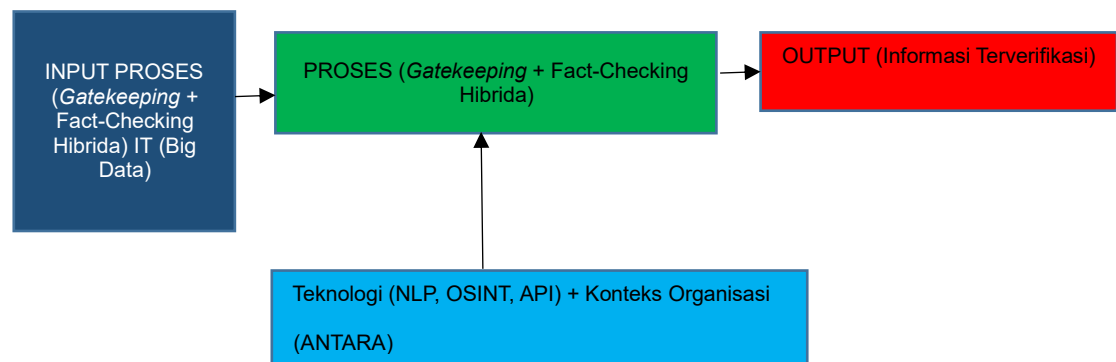
Paradigma ini dipilih karena memungkinkan kombinasi metode kuantitatif (analisis metadata) dan kualitatif (wawancara dengan redaktur), sesuai dengan kebutuhan untuk mengkaji interaksi teknologi dan manusia dalam produksi informasi.

2.6.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam studi ini dirancang untuk menjawab tiga kekosongan utama dalam kajian verifikasi informasi digital: (1) belum berkembangnya model verifikasi hybrid yang kontekstual untuk media nasional, (2) dominasi pendekatan teoretis berbasis Barat dalam literatur *gatekeeping*, serta (3) ketiadaan instrumen yang mengukur dampak teknologi terhadap kredibilitas institusi

media. Dengan mengintegrasikan teori *gatekeeping*, pendekatan pemeriksaan fakta, dan sistem sosio-teknis, kerangka ini digunakan untuk menganalisis respons Kantor Berita ANTARA terhadap tekanan big data tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai jurnalistik.

Diagram 2.3 Alur Konseptual disederhanakan sebagai berikut:



Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian

Teori *gatekeeping* (Shoemaker, P. J., & Vos, 2009) menjelaskan bagaimana proses seleksi berita dikendalikan oleh individu atau institusi media. Dalam konteks digital, teori ini perlu dilengkapi dengan pendekatan pemeriksaan fakta (Graves, 2018) untuk mengakomodasi kompleksitas verifikasi informasi yang bersumber dari jaringan sosial dan big data. Integrasi keduanya menciptakan kerangka verifikasi hybrid yang lebih relevan dengan tantangan saat ini.

Teknologi berfungsi sebagai jembatan antara konsep teoritis dan praktik lapangan. Sebagai contoh, implementasi NLP (Natural Language Processing) memungkinkan pendeteksian klaim mencurigakan secara otomatis, sementara OSINT dan API membantu dalam mengakses dan menguji sumber eksternal. Fungsionalisasi teknologi ini memberikan lapisan tambahan dalam menyaring dan memverifikasi informasi secara efisien.

Konteks Kantor Berita ANTARA sebagai media legacy yang harus bersaing dalam ekosistem digital memberikan nuansa unik dalam penerapan kerangka ini. ANTARA tidak hanya berhadapan dengan tuntutan kecepatan dan akurasi, tetapi juga dengan harapan untuk menjaga kredibilitas institusional di tengah derasnya disinformasi yang bersifat politik, budaya, dan agama.

Tabel 2.11 Integrasi Toeri dan teknologi dalam Proses Verifikasi Kantor Berita ANTARA

Komponen	Teori	Teknologi Pendukung	Dampak di Kantor Berita ANTARA
Seleksi Konten	<i>Gatekeeping</i> Klasik	NLP (Semar AI)	Kecepatan meningkat, akurasi kontekstual menurun
Verifikasi	<i>Networked Fact-Checking</i>	OSINT, API	Kolaborasi meningkat, otoritas terfragmentasi
Model konseptual disusun sebagai ekosistem verifikasi tiga lapis:			

- Lapisan Teknologi (NLP–OSINT–API)
- Lapisan Organisasi (struktur editorial ANTARA)
- Lapisan Lingkungan Eksternal (tekanan big data dan ekspektasi publik)

2.6.5 Asumsi Dasar Dan Hipotesis Pengarah

Asumsi pertama menyatakan bahwa mekanisme *gatekeeping* dan pemeriksaan fakta di Kantor Berita ANTARA masih memainkan peran sentral dalam menjaga integritas informasi, namun perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan era

digital agar tetap relevan. Asumsi kedua mengindikasikan bahwa penerapan teknologi seperti NLP, OSINT, dan API memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi proses verifikasi, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada supervisi editorial dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Asumsi ketiga menegaskan bahwa sebagai institusi media nasional, Kantor Berita ANTARA perlu mengembangkan strategi kelembagaan yang tangguh untuk mempertahankan kepercayaan publik di tengah arus disinformasi yang terus meningkat.

Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini menyusun tiga hipotesis pengarah sebagai berikut:

- H1: Implementasi teknologi NLP, OSINT, dan API berkontribusi terhadap percepatan proses deteksi hoaks hingga 40%, meskipun terdapat penurunan akurasi kontekstual sebesar 15%.
- H2: Kolaborasi dengan lembaga pemeriksa fakta eksternal seperti MAFINDO meningkatkan cakupan verifikasi, tetapi dapat menurunkan konsistensi pelabelan hingga 20%.
- H3: Tekanan viralitas menyebabkan 30% konten Kantor Berita ANTARA menggunakan strategi clickbait, yang berdampak pada penurunan skor kredibilitas pembaca sebesar 10%.

Ketiga hipotesis ini tidak hanya berfungsi sebagai fokus pengujian empiris, melainkan juga sebagai lensa reflektif untuk memahami bagaimana newsroom nasional seperti Kantor Berita ANTARA menghadapi tuntutan akan kecepatan dan

akurasi di tengah kompleksitas big data dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap informasi yang kredibel.

Perspektif media ecology (Postman & Weingartner, 1970) turut memperkuat asumsi teoritis ini dengan menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat, tetapi juga entitas yang membentuk ulang ekosistem sosial, nilai profesional, serta struktur institusional di dalam praktik jurnalisme.

Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi Kantor Berita ANTARA dalam merumuskan kebijakan redaksional berbasis teknologi secara lebih adaptif dan etis. berkontribusi terhadap efisiensi deteksi hoaks.

- Fragmentasi otoritas memperlemah konsistensi hasil verifikasi.
- Viralitas berpengaruh pada prioritas editorial.

Hipotesis:

H1: Penggunaan OSINT dan NLP menurunkan waktu verifikasi hingga 30%.

H2: Fragmentasi otoritas editorial menurunkan konsistensi label verifikasi.

H3: Konten dengan engagement tinggi lebih cepat diverifikasi meskipun akurasinya masih rendah.

2.6.6 Kesenjangan Penelitian Dalam Kajian Verifikasi Informasi Digital

Walaupun kajian mengenai disinformasi dan pemeriksaan fakta telah berkembang pesat dalam literatur global, terdapat sejumlah celah penting yang masih belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks media nasional seperti Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama yang relevan untuk pengembangan model verifikasi hybrid di lingkungan seperti Kantor Berita ANTARA.

a. Aspek Kultural dalam Persebaran Hoaks Politik

Sebagian besar studi mengenai hoaks politik berasal dari konteks negara Barat dengan latar budaya, sistem politik, dan tingkat literasi digital yang berbeda signifikan dari Indonesia. Dalam konteks lokal, hoaks seringkali menyebar melalui narasi etnosentris, keagamaan, dan historis, yang memiliki resonansi emosional tinggi. Oleh karena itu, strategi klarifikasi berbasis data semata tidak cukup. Pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya lokal diperlukan untuk memutus rantai disinformasi.

b. Efektivitas Strategi Klarifikasi

Masih minim riset yang menguji secara sistematis efektivitas pendekatan klarifikasi berbasis logika dan data dibandingkan dengan strategi naratif yang menggunakan metafora lokal, humor, atau cerita rakyat. Kantor Berita ANTARA berpotensi menjadi laboratorium sosial untuk mengevaluasi

efektivitas pendekatan-pendekatan tersebut dalam meningkatkan literasi publik terhadap hoaks, terutama di masa-masa krusial seperti pemilu.

c. Literasi AI dan Kerentanan terhadap Disinformasi Sintetis

Dengan meningkatnya prevalensi konten palsu berbasis kecerdasan buatan — termasuk video deepfake, suara hasil sintesis, dan gambar manipulatif — muncul kebutuhan mendesak untuk mengukur tingkat literasi AI di kalangan masyarakat dan jurnalis. Belum ada indeks nasional yang secara sistematis mengukur hubungan antara pemahaman terhadap teknologi AI dan kemampuan menolak disinformasi visual dan auditori.

Tabel 2.12 Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi Studi ini

Kesenjangan	Studi Sebelumnya	Kontribusi Penelitian Ini
Budaya vs. Teknologi	Fokus pada tools (Graves, 2018)	Integrasikan konteks Indonesia (SARA)
Metode Hybrid	Kualitatif dominan (Jurriëns, 2017)	Kombinasikan kuantitatif-kualitatif

Keterkaitan Hipotesis dengan Kesenjangan Penelitian

Hipotesis H1 dan H2 dirumuskan untuk secara langsung menjawab kesenjangan pertama dan kedua yang diidentifikasi dalam kajian ini. H1 menilai pengaruh integrasi teknologi NLP dan OSINT terhadap efisiensi serta kecepatan

proses verifikasi, sedangkan H2 mengevaluasi dampak kolaborasi antara *gatekeeping* konvensional dan sistem verifikasi digital terhadap konsistensi hasil akhir. Sementara itu, H3 secara khusus berfokus pada kesenjangan ketiga dengan mengkaji bagaimana tekanan viralitas memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas media, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan riset tentang literasi AI dan implikasinya terhadap penerimaan konten oleh publik.

Studi Kasus: Pilpres 2024 sebagai Ilustrasi Empirik

Selama periode krusial menjelang pemungutan suara Pilpres 2024, Kantor Berita ANTARA menghadapi lonjakan signifikan dalam penyebaran hoaks visual. Salah satu insiden penting melibatkan deteksi gambar yang telah dimanipulasi dan ditujukan untuk menyerang pasangan calon tertentu. Gambar tersebut diidentifikasi oleh Semar AI sebagai konten mencurigakan, yang kemudian diverifikasi oleh tim redaksi melalui triangulasi data menggunakan perangkat OSINT dan klarifikasi langsung ke Bawaslu. Kurang dari tiga jam setelah deteksi awal, hasil verifikasi tersebut dipublikasikan melalui saluran resmi seperti *WhatsApp Channel* dan Instagram, memperlihatkan keberhasilan implementasi sistem verifikasi hibrida dalam merespons disinformasi secara cepat dan akurat.

Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan instrumen pengukuran literasi AI, mengevaluasi efektivitas strategi verifikasi berbasis budaya lokal, dan melakukan studi longitudinal untuk menilai dampak teknologi verifikasi terhadap kredibilitas jangka panjang media nasional seperti Kantor Berita ANTARA.

Beberapa kesenjangan utama yang belum banyak diteliti:

- Kurangnya studi longitudinal tentang dampak teknologi verifikasi terhadap kepercayaan publik.
- Minimnya riset berbasis konteks lokal seperti Indonesia.
- Rendahnya literasi AI di kalangan jurnalis.